



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian kinerja *output* serta capaian *outcome*. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun diperlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kualitas *outcome* dan *output* sesuai target.

Namun demikian, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan pendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Jakarta, Januari 2023

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan



Nani Hendiarti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI	2
1.5 ISU-ISU STRATEGIS	3
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 RENCANA STRATEGIS	9
2.1.1 VISI & MISI	10
2.1.2 SASARAN STRATEGIS	11
2.2 PERENCANAAN KINERJA	12
2.3 PENGUKURAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
3.1.1 SASARAN STRATEGIS 1	16
3.1.2 SASARAN STRATEGIS 2	19
3.1.3 SASARAN STRATEGIS 3	23
3.1.4 SASARAN STRATEGIS 4	27
3.1.5 SASARAN STRATEGIS 5	32
3.1.6 SASARAN STRATEGIS 6	35
3.1.8 SASARAN STRATEGIS 8	46

3.1.9 SASARAN STRATEGIS 9	48
3.1.10 SASARAN STRATEGIS 10	58
3.1.11 SASARAN STRATEGIS 11	83
BAB IV. PENUTUP.....	91
4.1 .INTERNAL.....	92
4.2. EKSTERNAL.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	3
Gambar 2 Sasaran Strategi	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perencanaan kerja	13
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan fakta geografis, tidak dapat dipungkiri, Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia. 16.056 pulau telah diakui oleh PBB (dengan catatan, proses pembakuan masih terus berjalan) yang terbentang dari pulau Rondo di ujung Sumatera hingga ujung Merauke di Papua adalah fakta yang menegaskan hal tersebut. Namun tidak cuma itu, pulau-pulau yang terbentang di wilayah laut seluas 5.8 juta km² dalam wilayah Indonesia juga menegaskan posisi penting Indonesia sebagai sebuah benua maritim dengan wilayah laut mencakup 70% dari total wilayah dan terletak di posisi silang strategis jalur perdagangan dunia.

Sebagai negara yang berada pada poros perdagangan dunia, posisi silang Indonesia tidak hanya penting dalam konteks perdagangan internasional namun juga melahirkan karakteristik sumber daya hayati yang sangat beragam dan khusus, namun Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim berpotensi menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karenanya upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan pengendalian perubahan iklim telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menurunkan emisi dan intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penerapan pendekatan pembangunan rendah karbon.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan terkait pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 berdasarkan sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas

pencapaian sasaran kinerja terkait pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada Triwulan IV Tahun 2022. Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan kemudian dirumuskan menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

1.3 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. **Mengefektifkan jalannya** koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan
2. **Mengoptimalkan pengendalian** pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan
3. **Melaksanakan** pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan secara **tepat dan akurat**
4. **Membangun dan mengembangkan** kapasitas kelembagaan dan kompetensi di bidang koordinasi pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang **responsif**; dan
5. **Melaksanakan fungsi lain** yang diberikan oleh Menteri Koordinator terkait bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan **sesuai arahan**.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan organisasi Deputi Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan didukung oleh 5 (lima) Asisten Deputi dan 1 (Satu) Sekretaris Deputi. Sebagaimana ditampilkan pada Diagram dibawah ini :



Gambar 1 Struktur Organisasi

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat sembilan misi dimana aspek lingkungan hidup merupakan misi ke-4 yakni “Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan”. Dalam mengimplementasikan misi tersebut, telah ditetapkan lima pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 3 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah:

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator: (1) luas minimal Kawasan berfungsi lindung dari 55 juta hektar menjadi 65 juta hektar (2024); (2) kawasan hutan produksi dari 33,7 juta hektar menjadi 36,0 juta hektar (2024).
- b. perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator: (1) sub sektor kehutanan memberikan kontribusi dalam lingkup pertumbuhan PDB Pertanian dari 3,5% menjadi 6,8% (2024); (2) produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m³/tahun menjadi 60 juta m³/tahun (2024); (3) destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas dari 9 destinasi menjadi kumulatif 25 (2024).

Untuk merealisasikan sasaran di atas, yaitu dilakukan melalui dua pendekatan: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Rincian untuk masing-masing pendekatan dijelaskan di bawah ini. Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi, mencakup:

- a. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) memantapkan Kawasan hutan berfungsi lindung; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau.
- b. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau difokuskan pada 15 danau prioritas nasional, yaitu: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Rawa Danau, Danau Rawa Pening, Danau Batur, Danau Sentarum, Danau Kaskade Mahakam (Semayang-Melintang-Jeumpang), Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, dan Danau Sentani.

Sementara itu, arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi, mencakup: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil

dan industrialisasi, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas kehutanan yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan produktivitas, penguatan rantai pasok yang mempengaruhi efisiensi alur input-proses-output dan distribusi; (3) mengembangkan hilirisasi industri kehutanan difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama seperti kayu, rotan, dan lain-lain serta diperkuat juga dengan pendekatan praktik budidaya berkelanjutan dan agroforestry; (4) dukungan penyiapan sumber daya manusia terampil melalui kerja sama vokasi antara kementerian/lembaga, lembaga diklat, industri dan pemerintah daerah; (5) penguatan circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; (6) Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor hasil hutan dengan meningkatkan produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m³/tahun menjadi 60 juta m³/tahun (2024);

2. Prioritas Nasional (PN) 3: Meningkatkan SDM Berkualias dan Berdaya Saing. Sasaran Prioritas Nasional (PN) 3 terkait dengan bidang tugas Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah:
 - a. Penataan penguasaan dan kepemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dengan target capaian 2,53 juta ha (tahun 2024)
 - b. Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat dengan target pemberian akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat seluas 4 juta ha (2024) dan peningkatan kapasitas (kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha) kelompok masyarakat sebanyak 5.900 KUPS (2024).

3. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah:
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 83,5 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,0 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5

menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem Gambut (IKTL) dari 62 poin menjadi 60,3 poin (2024)

- 2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024); (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024); (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024); (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024); (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024); (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut.
- 3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang dikelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024); (3) jumlah limbah B3 yang dikelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024)
- 4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024); (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024); (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024).
- 5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 % (2024); (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024); (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar

(2024); (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan indikator meliputi:
 - a. Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana menjadi 0,10% PDB pada Tahun 2024.
 - b. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim menjadi 1,15% PDB sektor tersebut pada Tahun 2024,
 - c. Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dari 5 menit (2019) menjadi 3 menit pada Tahun 2024.
- c. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi:
 1. Pembangunan rendah karbon dengan indikator yaitu: (1) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi dari 10,3% (2019) menjadi 13,2% (2024); (2) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan dari 36,4% (2019) menjadi 58,3% (2024); (3) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah dari 8,0% (2019) menjadi 9,4% (2024); (4) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU dari 0,6% (2019) menjadi 2,9% (2024); (5) persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan laut menjadi 7,3 % (2024),
 2. Pemulihan lahan berkelanjutan dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut per tahun dari 122.833 hektar menjadi 330.000 hektar (2024); (2) luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional per tahun dari 206.000 menjadi 420.000 hektar (2024),
 3. Pengelolaan limbah dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang dikelola secara nasional dari 67,5 juta ton (baseline 2019) menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill menjadi 3.885.755 KK; (3) jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R menjadi 409.078 RT; (4) jumlah rumah tangga yang terlayani TPST menjadi 494.152 RT,

4. Pengembangan industri hijau dengan indikator yaitu : (1) persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi standar industri hijau/SIH mejadi 10 perusahaan; (2) jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor industri dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024); (3) jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024),
5. Rendah karbon pesisir dan laut dengan indikator yaitu luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai dari 1.000 hektar menjadi 50.000 hektar (2024).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi sektor lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia antara lain: pencemaran lingkungan oleh limbah; penumpukan sampah/sampah plastik di daratan dan sampah laut yang bersumber dari aktivitas yang berbasis daratan maupun dari laut; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim global; perambahan kawasan hutan; kebakaran hutan dan lahan (karhutla) banjir rob akibat penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut; penataan dan restorasi gambut; penataan dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau endemik; serta faktor-faktor lain yang menurunkan kualitas lingkungan dan ekosistem hutan. Untuk itu pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia harus dirancang untuk dapat memberikan kemanfaatan ekonomi secara luas dan optimal dengan tetap mengutamakan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya. Sehingga keberadaan lingkungan dan sumber daya hutan bagi kehidupan masyarakat Indonesia bisa mencapai kondisi lestari, baik secara ekologi, ekonomi, maupun sosial.

Dalam jangka panjang diperlukan upaya-upaya pemulihan lingkungan dan hutan secara menyeluruh dengan skala yang lebih luas, mencakup penataan ulang alokasi sumber daya hutan, pemenuhan komitmen Indonesia dalam kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dan pengendalian perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan/gambut, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Sasaran pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia ke depan secara garis besar diarahkan pada perwujudan: 1) Lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim; 2). Pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk capaian nilai keekonomian optimum; 3). Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4). Tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan dan kehutanan yang semakin berdaya saing.

Penciptaan kondisi lestari secara ekologi, ekonomi dan sosial ini, seyogyanya ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan lingkungan dan kehutanan

nasional yang berkelanjutan, karena bertujuan membuka kemanfaatan seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat dan dunia usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, maka pemanfaatan sumber daya lingkungan dan kehutanan mencakup spektrum yang lebih luas, sehingga tidak hanya berdampak dalam skala lokal maupun nasional, tetapi juga mampu menjawab tantangan internasional.

2.1.1 VISI & MISI

Visi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tidak terlepas dari 5 (lima) sasaran strategis Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi yang sangat terkait dengan tugas fungsi Deputy Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, sebagai pengejawantahan dari Visi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia; dan Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam; dan tentunya dengan memperhatikan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis. Untuk itu Deputy Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menetapkan Visinya adalah sebagai berikut:

“MEMBANGUN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN SECARA EKOLOGI, EKONOMI, MAUPUN SOSIAL”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, adalah sebagai berikut:

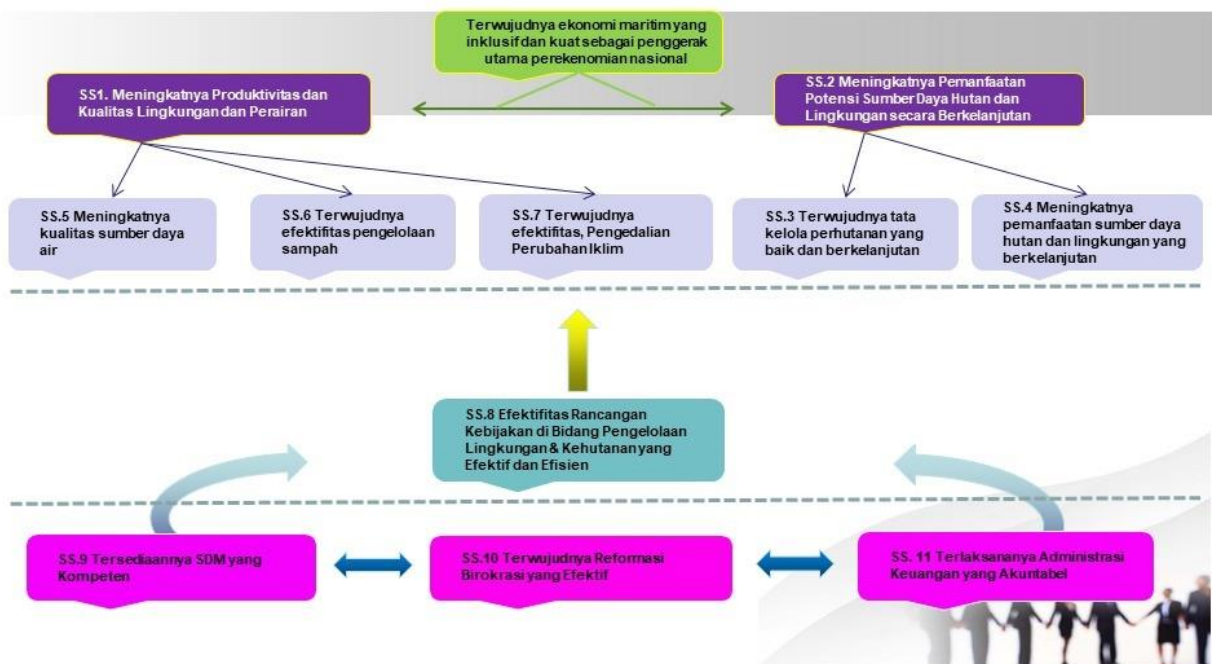
“MENJALANKAN EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN, SERTA PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN SECARA EKOLOGI, EKONOMI, MAUPUN SOSIAL”

Misi tersebut merupakan langkah peran dan fungsi Kedeputian dalam mengupayakan dan memastikan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, tentang aspek lingkungan hidup (misi ke-4 dan agenda ke-6) dalam Pembangunan Nasional, yaitu terciptanya

lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang memiliki ketahanan yang baik terhadap bencana dan mampu merespon perubahan iklim. Pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan; Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Konservasi Sumber Daya Alam; Pengelolaan Sampah dan Limbah; serta Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan.

2.1.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis untuk pencapaian visi dan misi Deputy Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada Peta strategis berikut :



Gambar 2 Sasaran Strategi

Deputy Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan membagi sasaran kedeputian ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (stakeholder perspective), perspektif pengguna (customer perspective), perspektif proses bisnis internal (internal business process perspective) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective).

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan melalui sasaran strategis utama yakni:

- 1) Meningkatnya produktivitas dan kualitas lingkungan dan perairan Indonesia; dan
- 2) Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dan dievaluasi per triwulan. Rencana dan target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,00
SS.2	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan	2	Persentase Peningkatan PDB Kehutanan	1%
Customer Perspective				
SS.3	Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan	3	Capaian Luas Kawasan Perhutanan sosial	500.000 Ha
SS.4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	4	Persentase target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu	90%
SS.5	Meningkatnya kualitas sumber daya air	5	Nilai peningkatan kualitas sumber daya air di 15 DAS Prioritas	55,3
SS.6	Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah	6	Tingkat Efektifitas penanganan sampah	60%
SS.7	Terwujudnya efektifitas, Pengendalian Perubahan iklim	7	Persentase Capaian target NDC <i>Unconditional</i>	1,5%

Internal Bisnis Perspective				
SS.8	Efektifitas rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	8	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	50%
		9	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan yang dilaksanakan	50%
Learning & Growth Perspective				
SS.9	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang sesuai Kompetensi	90%
SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	>75
		12	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	85
SS.11	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	95

Tabel 1 Perencanaan kerja

2.3 PENGUKURAN KINERJA

Penilaian hasil Laporan Kinerja Akhir Triwulan IV Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Dan Kehutanan Tahun 2022 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diketahui Nilai Kinerja Organisasi. Formula penghitungan Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun Status Kinerja ditandai dengan warna, pemberian warna sesuai nilai kinerja, adalah sebagai berikut:

Hijau	Kuning	Merah
$X \geq 100$	$80 \leq X \leq 100$	$X \leq 80$
Memenuhi Kriteria	Belum Memenuhi	Tidak Memenuhi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan didasarkan pada Stake Holders perspective, customer perspective, Internal Business Process dan Learning and Growth Pada Triwulan IV Tahun 2022. Setelah itu, dilakukan analisis atas capaian terkait hal-hal yang menunjang atau menurunkan capaian kinerja, analisis sumber daya dan program penunjang tercapainya kinerja.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN TAHUN 2022
Stakeholder Perspective						
SS.1	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,45	69,00	72,55
SS.2	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan	2	Persentase Peningkatan PDB Kehutanan	1,34%	1%	136%
Customer Perspective						
SS.3	Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan	3	Persentase Capaian Luas Kawasan Perhutanan sosial	506.219 Ha	500.000 Ha	423.159 Ha
SS.4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	4	Persentase target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu	90%	90%	136%
SS.5	Meningkatnya kualitas sumber daya air	5	Nilai peningkatan kualitas sumber daya air di 15 DAS Prioritas	55,0	55,3	53,88
SS.6	Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah	6	Tingkat Efektifitas penanganan sampah	63,5%	60%	60%

SS.7	Terwujudnya efektifitas pengendalian Perubahan Iklim	7	Persentase Capaian Target NDC <i>Unconditional</i>		1,5%	9,63%
Internal Bisnis Perspective						
SS.8	Efektifitas rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	8	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	120%	50%	100%
		9	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan yang dilaksanakan	62,5%	50%	100%
Learning & Growth Perspective						
SS.9	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10	Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang sesuai Kompetensi	90,5%	90%	90%
SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	68,74	>75	70,75
		12	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	90,36	85	93,94
SS.11	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	13	Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	96,55	95	94,33

Dalam rangka mencapai target kinerja tahunan sebagai pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Pengelolaan lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022, dilaksanakan 11 sasaran strategis yang secara rinci dijelaskan di bawah ini:

3.1.1 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia

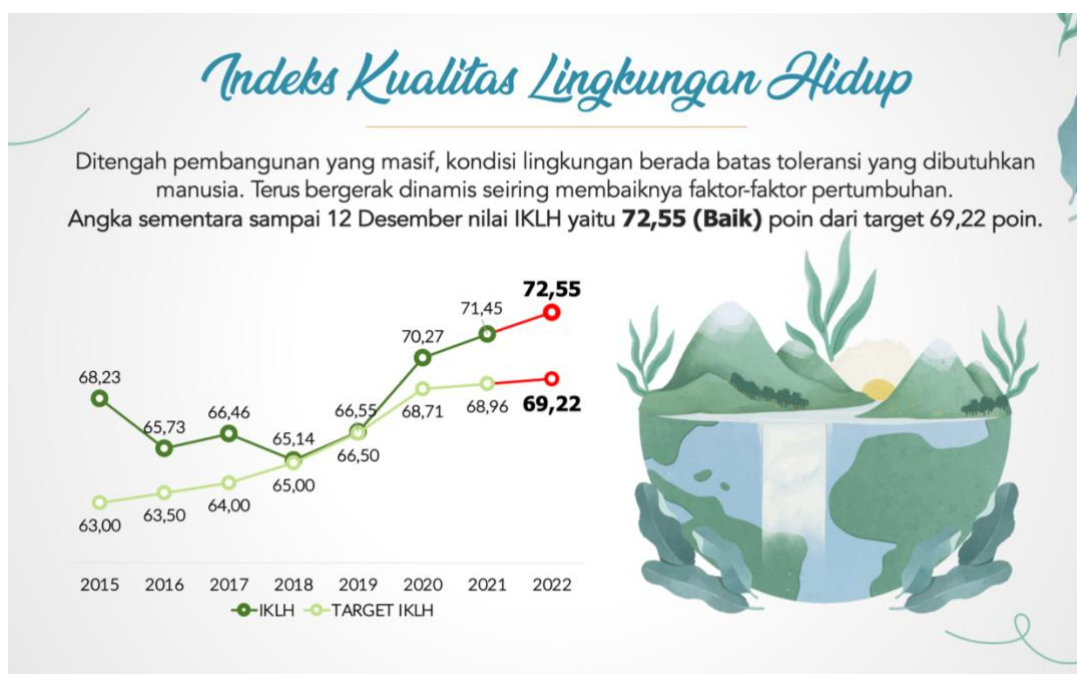
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai IKLH tahun 2022 secara resmi belum dikeluarkan oleh KLHK karena masih dalam proses pengumpulan data dari seluruh propinsi. Sesuai dengan kaidah pelaporan kinerja, maka angka IKLH tahun 2022 yang dipakai sebagai evidence capaian kinerja sementara untuk Sasaran Strategis tersebut menggunakan data dari bahan paparan refleksi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) per Desember 2022. Data ini akan dimutakhirkan kembali setelah Dokumen IKLH tahun 2022 resmi dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Data sementara IKLH tahun 2022 ini mengalami kenaikan dengan capaian sebesar 72,55. Nilai IKLH ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 71,45, dengan rincian capaian indikator sebagai berikut:

- a. Indek Kualitas Air (IKA) sebesar 55,30 dari target 53,88;
- b. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 88,06 dari target 84,30;
- c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 61,48 dari target 63,50, dan;
- d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 84,41 dari target 59,50;

Secara tren sejak 2015, skor IKLH cenderung meningkat meskipun sempat menurun pada 2016 dan 2018. Peningkatan tajam terjadi pada 2020 dari 66,55 poin pada 2019 menjadi 70,27 poin.





Sumber : Bahan Refleksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Monev Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Marves

Dalam usaha pencapaian target IKLH tahun 2022 telah dilakukan koordinasi antara Kemenko Marves dengan KLHK terkait dengan progress capaian terhadap indikator pendukung IKLH, seperti table berikut :

PROGRES IKP S/D JUNI 2022

Indikator Kinerja Program	Progres
a. Indeks Kualitas Udara	<ol style="list-style-type: none"> Melanjutkan analisis data sampel dan input hasil analisis ke aplikasi IKLH Pengiriman alat passive sampler tahap II ke 34 Provinsi (509 Kabupaten/Kota) Evaluasi quality control data analisis
b. Indeks Kualitas Air	Pengambilan sampel kualitas air sungai tahap II di regional Sumatera, Sulawesi, Jawa dan Kalimantan
c. Indeks Kualitas Lahan	<ol style="list-style-type: none"> Input data luasan administrasi Pengolahan data potensi peningkatan tutupan lahan
d. Indeks Kualitas Air Laut	<ol style="list-style-type: none"> Analisis laboratorium Input hasil uji lab mencapai 472 dari target 752



Untuk Capaian Sasaran Strategis 1 ini dari tahun ketahun sesuai dengan Rencana Aksi RPJM pada renstra Deputi PLK dapat dilihat pada table berikut :

SS	IKU	2020			2021			2022		
		RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian
Meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66.95%	66,95	66.55%	67.33%	69,00	71,43	67.7%	69,00	72,55%

Tabel 3. Perbandingan Target dan Capaian SS.1 sesuai Rencana Aksi RPJMN Deputi PLK 2020-2024

3.1.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki hutan tropis dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Dalam kaitan itu, Pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan hutan dengan tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya. Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memberikan manfaat yang optimal, baik lingkungan, sosial maupun ekonomi bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus berpartisipasi aktif dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab global.

Guna mendorong peningkatan pemanfaatan produk terutama dari hutan produksi melalui pemenuhan 80% dari target jumlah produksi hasil hutan kayu di tahun 2020 sebesar 47 juta M3 (Renstra KLHK 2020-2024, Hal: 178). Beberapa koordinasi telah dilaksanakan melalui rangkaian rapat koordinasi teknis. Kondisi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dirasakan sangat berdampak pada sector produksi hasil hutan kayu. Penguatan koordinasi oleh Kemenkomarves dengan Kemendag, KLHK, Kemenperin, dan Kemenkeu melalui pemenuhan beberapa usulan relaksasi di sektor kehutanan telah dilaksanakan sehingga realisasi capaian jumlah produksi hasil hutan kayu pada tahun 2020 sejumlah 42.145.399 M3 sama dengan 90% dari target tahun 2020 yaitu 47.000.000 M3.

Proses mencapai target pada sasaran startegis ini pada Triwulan IV Kedepuitan Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian Kegiatan	Target	Capaian	Kendala dalam mencapai Target
1.	Integrasi Data dan Informasi Sektor Hulu dan Hilir Produk Industri Kehutanan	Dokumen Rekomendasi dan Diagram Alir Proses Bisnis Integrasi Sektor Hulu dan Hilir Produk Industri Kehutanan	Proses penyusunan kajian akademis	Data dan informasi yang masih tersebar di K/L dan Pemda, dan proses bisnis Industri hilir yang belum siap.
2.	Koordinasi kebijakan impor mesin pengolahan hasil hutan kayu dalam keadaan tidak baru dan kajian pengembangan inovasi mesin guna penguatan produk dalam negeri	Revisi lampiran Permendag 118 untuk jenis mesin yang akan diimpor dalam keadaan tidak baru, dan kajian rekomendasi pengembangan mesin pada industri dalam negeri	Penyampaian permohonan validasi data kode HS kepada Bea dan Cukai, dan validasi data kebutuhan jumlah mesin, jenis, dan spesifikasi.	Perlu identifikasi kode HS dari jenis mesin yang dibutuhkan untuk diimpor dan jumlah industri plywood yang akan restrukturisasi

Peningkatan Kontribusi Subkategori Kehutanan dari tahun ketahun di dorong oleh 2 hal yaitu :

1. Peningkatan produksi Kayu bulat

2. Peningkatan bahan baku kayu yang sejalan dengan peningkatan penjualan ekspor furniture dan komponen bangunan

INDIKATOR KEHUTANAN TRIWULAN 2-2022 ⁽²⁾

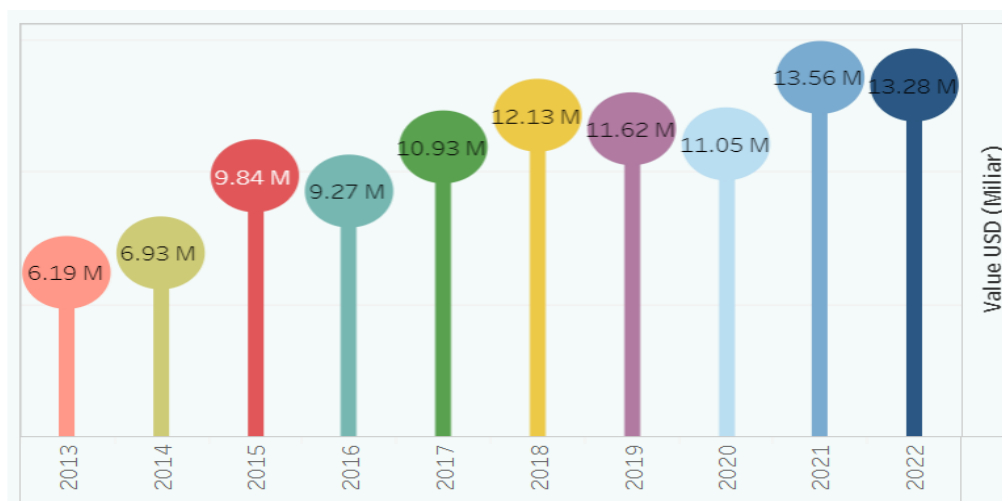
Pertumbuhan Produksi Kayu Bulan Menurut Kelompok Jenis (%)

KELOMPOK JENIS	Share 2021	Triwulan I 2022		Triwulan II 2022	
		QtoQ	YoY	QtoQ	YoY
Hutan Tanaman Industri	56,37	-2,11	-3,20	-13,60	-3,62
Jenis Dilindungi	0,00	-100,00	0,00	0,00	5,71
Jenis Kayu Lainnya	0,01	18,88	281,29	-45,59	-53,47
Jenis Khusus	2,84	-27,44	24,06	-5,11	-20,40
JENIS KHUSUS	0,10	-99,96	-99,78	9.627,27	-87,60
Kayu Eboni	0,00	-76,51	-88,49	477,14	-18,22
Kayu Indah	0,28	-52,67	9,66	22,39	-24,54
Kelompok Meranti	9,05	-60,24	-2,55	66,43	-14,91
Rimba Campuran	31,35	-3,43	12,17	4,01	9,11
Total	100,00	-10,34	2,15	-3,21	-1,16

Sumber : Satu Data Ditjen PHL (<https://phl.menhk.go.id/tabular>)



Sehubungan Angka PDB Kehutanan Tahun 2022 secara resmi belum di rilis oleh BPS, Berdasarkan data Release Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per Desember 2022 terkait nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan PDB Kehutan. Dalam upaya peningkatan nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu pada tahun 2022 telah dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian melalui beberapa rapat koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan guna mencapai target 9.75 M USD (Renstra KLHK 2020-2024, Hal: 182). Per Desember 2022, Pencapaian nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar 13.28 M USD dari target 9.75 M USD dengan kata lain capaian sudah melebihi target sebesar 136%, namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,56 M USD, capaian ini mengalami penurunan sebesar 0.28M USD seperti terlihat pada table dibawah ini :



Sumber: Data Ditjen PHL, KLHK per Desember 2022 diakses pada laman <https://phl.menlhk.go.id/infografis>

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi jumlah produksi dan nilai ekspor produk industri kehutanan yakni:

1. Kondisi bencana non alam pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020-2022 berdampak pada berbagai sektor termasuk kehutanan,
2. Alur peredaran produk hasil hutan kayu yang belum terkoneksi dari sektor hulu hingga hilir,
3. Data kebutuhan produk industri kayu di dalam negeri yang belum tercatat secara sistem sebagai masukan atas penentuan kebijakan ketentuan ekspor,
4. Belum adanya kepastian pemenuhan bahan baku untuk industri hilir guna peningkatan produksi dan peningkatan ekspor produk industri kehutanan

Untuk Capaian Sasaran Strategis 2 ini dari tahun ketahun sesuai dengan Rencana Aksi RPJM pada renstra Deputi PLK dapat dilihat pada table berikut :

SS	IKU	2020			2021			2022		
		RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian
Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan	PDB Kehutanan Pertumbuhan 2019:- 0,23%	1%	1%	100%	1%	1%	1.34%	1%	1%	136%

Tabel 4. Perbandingan Target dan Capaian SS.2 sesuai Rencana Aksi RPJMN Deputi PLK 2020-2024

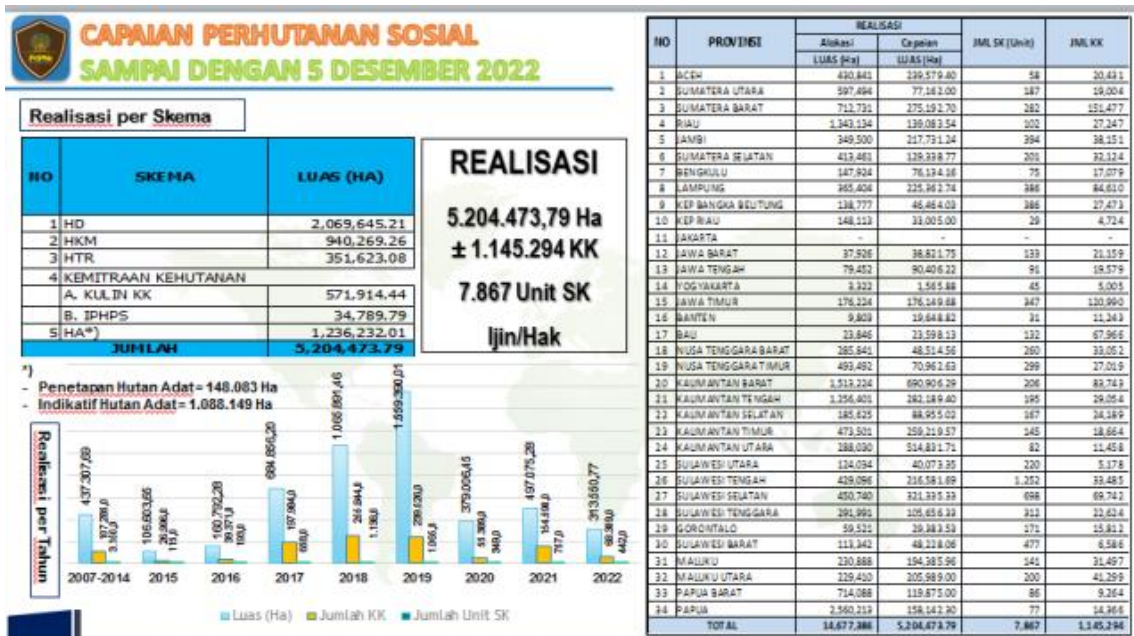
3.1.3 Sasaran Strategis 3

Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan

Indonesia memiliki luas kawasan hutan 125 juta ha yang memiliki peran penting dari sisi ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi, termasuk ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dari sekitar 74.000 desa di Indonesia, terdapat 25.863 desa (30%) yang berada dan sekitar 71% mengantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan. Namun sayangnya, 10,2 juta (36%) masyarakatnya hidup dalam kondisi miskin. Kondisi kemiskinan dan ketidakmerataan dalam pengelolaan sumberdaya hutan (95% dikelola oleh korporasi) menyebabkan terjadinya permasalahan sosial yaitu konflik tenurial.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres 109/2020. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Dengan program Perhutanan Sosial ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, penyelesaian konflik terunial, pembangunan daerah, penurunan disparitas antar wilayah serta perbaikan kualitas lingkungan.

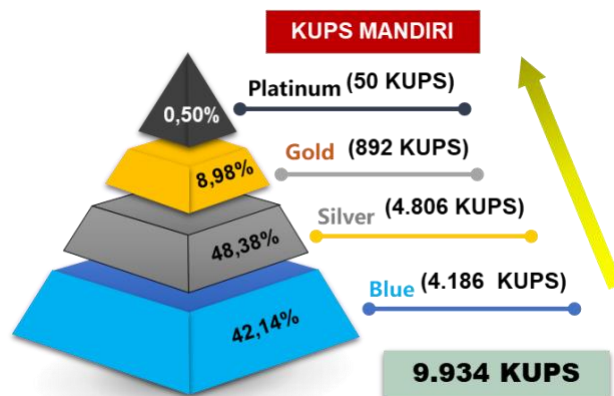
Pemerintah telah menetapkan target pemberian akses Kelola kawasan hutan untuk masyarakat seluas 12,7 juta ha sampai tahun 2024. Pemberian akses kawasan hutan untuk masyarakat ini dilakukan melalui 5 skema yaitu: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Namun demikian, sampai dengan tahun 2022, capaian kumulatif distribusi akses PS baru mencapai mencapai 5,2 juta ha yang diberikan kepada sekitar 1,2 juta KK (Gambar 1).



Gambar 1. Capaian Perhutanan Sosial

Untuk target distribusi akses PS pada tahun 2022 seluas 500.000 ha, realisasi yang dicapai per 31 Desember 2022 seluas 423.159 ha (84.36%). Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan karena adanya kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Pulau Jawa yang menyebabkan moratorium pemberian akses PS di Pulau Jawa serta adanya automatic adjustment untuk anggaran PS. Namun demikian, capaian target ini lebih dari dua kali lipat (235%) dari target KLHK tahun 2022 seluas 1800.000 ha.

Selain dari sisi distribusi akses PS, Pemerintah juga telah memfasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Usaka Perhutanan Sosial (KUPS). Sampai dengan Desember 2022, telah terbentuk 9.934 KUPS dengan berbagai jenis usaha (Gambar 2).



Gambar 2. Capaian Pembentukan Kelompok Usaka Perhutanan Sosial (KUPS)

Beberapa masalah yang menyebabkan belum tercapainya target pemberian akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat diantaranya:

1. belum terintegrasinya program perhutanan sosial dengan K/L dan Pemda;
2. komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten belum terjalin dengan baik;
3. belum lengkapnya sentra pelayanan di tingkat tapak yang mudah diakses masyarakat (Balai PSKL hanya ada di 5 region);
4. Kurang optimalnya dukungan Pokja PPS belum bekerja optima,
5. belum tersosialisasi dengan baiknya program perhutanan sosial hingga tingkat tapak, ,
6. kekurangan jumlah pendamping PS;
7. kapasitas SDM kurang memadai, .

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka diperlukan Langkah-langkah percepatan dengan perencanaan yang matang. Mengingat bahwa program perhutanan sosial merupakan PSN dan melibatkan banyak pihak (K/L, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Akademisi, LSM, dan masyarakat), maka peran Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi sangat strategis untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program perhutanan sosial. Pada tahun 2022, Kemenko Marves mengkoordinasikan K/L dan pemda melalui serangkaian rapat koordinasi dan pemantauan, serta menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong percepatan program Perhutanan Sosial diantaranya :

1. Memperkuat koordinasi di sektor melalui Kerja Bareng Jemput Bola (Jareng Jebol Hutsos). Jareng Jebol merupakan cara kerja baru pelayanan Perhutanan Sosial, yaitu dengan melakukan kolaborasi multipihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, kaum millenial) secara terintegrasi antar sektor, membangun kolaborasi dan kreasi (ko-kreasi) di tingkat tapak dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Memperkuat Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penguatan Regulasi dilakukan melalui penyusunan Rancangan Perpres Percepatan Perhutanan Sosial (telah final tahap harmonisasi). Penguatan kelembagaan dilakukan melalui Pembentukan dan Peningkatan efektifitas

Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PPS) tingkat propinsi.

Disamping itu ada beberapa rekomendasi untuk percepatan Perhutanan Sosial adalah sebagai berikut yang akan dilakukan kedepannya :

- a. Percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial;
- b. Penguatan kelembagaan Perhutanan Sosial, melalui optimalisasi peran Pokjanas PS dan Pokja PPS Provinsi serta pembentukan Pokja PPS Kabupaten;
- c. Melakukan integrasi dan sinergi program lintas K/L dan Pemda untuk peningkatan kinerja KUPS;
- d. Meningkatnya pengembangan usaha yang berskala ekonomi dan hilirisasi produk melalui Pengembangan Wilatag Terpadu (IAD) berbasis PS.
- e. Penguatan dan penambahan jumlah pendamping PS dari K/L dan Pemda. Dalam rangka memperkuat kerja dan kolaborasi antar pendamping, telah dibentuk Forum Komunikasi Pendamping Perhutanan Sosial di 5 wilayah Balai PSKL yang bertujuan sebagai wadah bertukar informasi, pengetahuan, pengalaman, dan menjalin kerjasama dengan mitra lainnya

Untuk Capaian Sasaran Strategis 3 ini dari tahun ketahun sesuai dengan Rencana Aksi RPJM pada renstra Deputi PLK dapat dilihat pada table berikut :

SS	IKU	2020			2021			2022		
		RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian
Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan	Tingkat kesiapan pemanfaatan Kawasan Hutan	125000 Ha	125.000 Ha	328%	500000 Ha	250.000 Ha	506.219 Ha	500000 Ha	500.000 Ha	423.159 Ha

Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian SS.3 sesuai Rencana Aksi RPJMN Deputi PLK 2020-2024

3.1.4 Sasaran Strategis 4

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 4 ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari dilaksanakan dengan strategi :

- a. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya;
- b. Peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), TSL dan *Bioprospecting*;
- c. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan.

Pada tahun 2022 guna mencapai target Pencapaian target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu dihitung berdasarkan realisasi nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu dibagi target nilai ekspor industri hasil hutan kayu dikalikan 100% yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Realisasi terdapat pada data pelaporan yang secara periodik dilakukan pembaharuan. Peningkatan nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu difokuskan dalam memberikan devisa yang memadai bagi negara dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kerusakan, dan meningkatkan produktivitas serta keberlangsungan usaha sektor kehutanan.

Dilakukan juga kegiatan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dengan menggali potensi dan mendorong daerah wisata alam yang ada dikawasan hutan pada daerah penyangga di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang dikenal sebagai Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Selain itu UUCK memberikan kemudahan

bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan dan pelestarian hutan adalah kondisi dimana sistem pengelolaan kawasan hutan dan lahan terkendali secara lestari baik secara ekologi, ekonomi dan sosial. Luas 370.000 ha kawasan pengayaan/penanaman perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang dicapai dapat diukur dengan membandingkan capaian luas kawasan pengayaan/penanaman perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan jumlah target luas kawasan pengayaan/penanaman perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan untuk mendorong pengelolaan hutan lestari. Koordinasi dan pengendalian dilaksanakan guna mendukung lancarnya pemeriksaan secara menyeluruh dan obyektif untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban dan larangan bagi pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan guna mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari.

Pengawasan peredaran hingga pemasaran hasil hutan merupakan bagian penting yang memerlukan perhatian Pemerintah dalam penentuan kebijakan di sektor kehutanan, salah satunya menjaga keseimbangan dan meningkatkan potensi industri kehutanan, mengurangi potensi terjadinya illegal logging yang merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kawasan hutan dan terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang mendukung legalitas produk industri kehutanan.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi jumlah produksi dan nilai ekspor produk industri kehutanan yakni (1) kondisi bencana non alam pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020-2022 berdampak pada berbagai sektor termasuk kehutanan, (2) Alur peredaran produk hasil hutan kayu yang belum terkoneksi dari sektor hulu hingga hilir, (3) Data kebutuhan produk industri kayu di dalam negeri yang belum tercatat secara sistem sebagai masukan atas penentuan kebijakan ketentuan ekspor (4) Kepastian pemenuhan bahan baku untuk industri hilir guna peningkatan produksi dan peningkatan ekspor produk industri kehutanan.

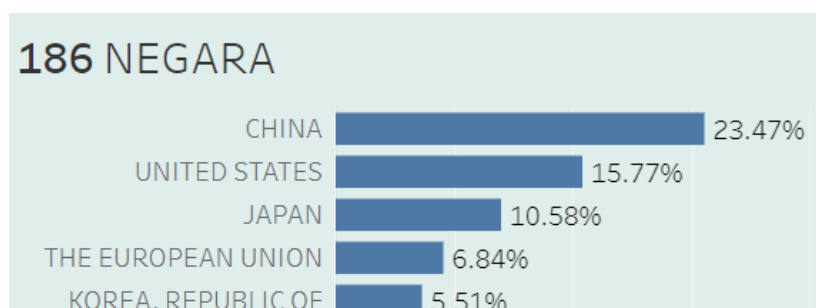
Kondisi ini membuat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, khususnya Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan terus berupaya untuk mendorong perbaikan tata kelola produk industri kehutanan secara berkelanjutan guna pengendalian kebijakan pengembangan dan pemasaran hasil hutan kayu.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah melangsungkan serangkaian koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dalam mendukung sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan. Guna tercapainya target indikator kinerja individu peningkatan nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu telah didorong alternatif kebijakan interkoneksi data dan informasi produk industri kehutanan dan kebijakan perpanjangan waktu perluasan ukuran penampang produk kayu olahan tujuan ekspor terdapat 2 Alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian hasil yang maksimal kedepannya :

1. Koordinasi interkoneksi data dan informasi produk industri kehutanan dilaksanakan sebagai upaya mendorong pemenuhan target ekspor, dari sisi perbaikan tata kelola dan kerbermanfaatan yang luas meliputi kepastian bahan baku bagi industri hilir yang sesuai dengan spesifikasi teknis ekspor produk industri kayu, peningkatan nilai PNBK sektor kehutanan, kebutuhan data sebagai dasar pengambilan kebijakan tata kelola pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri dan ekspor produk hasil hutan kayu, penurunan angka illegal logging dan peredaran hasil hutan kayu ilegal yang masuk ke industri hilir, serta kepastian akan legalitas dan kelestarian produk hasil hutan kayu di pasar global.

Pada tahun 2022 data capaian nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu sampai dengan bulan Desember tahun 2022 telah mencapai 13.28 M USD atau 136% dari target nilai ekspor sebesar 9,75 M USD (Renstra KLHK 2020-2024, Hal: 182). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan permintaan yang terlihat pada gambar 1.1 dengan 186 negara tujuan yang didominasi oleh 2 negara terbesar China dan USA terlihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 Negara tujuan ekspor



Sumber: Data Ditjen PHL, KLHK per Desember 2022 diakses pada laman <https://phl.menlhk.go.id/infografis>

Pola interkoneksi yang berada pada lokus industri primer dalam kewenangan KLHK ke industri hilir dalam kewenangan Kemenperin, saat ini proses pencatatan dan pelaporannya belum terkoneksi secara elektronik. Target pelaksanaan interkoneksi yakni guna mewujudkan sistem informasi yang mengakomodir data dan informasi peredaran kayu serta produk hasil hutan kayu dari penebangan kayu hingga perdagangan ekspor dan domestik.

2. Kebijakan perpanjangan waktu perluasan ukuran penampang produk kayu olahan tujuan ekspor dilaksanakan dalam rangka relaksasi kebijakan pada masa pandemic Covid-19 yang sebelumnya telah diakomodir pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2021 dengan ketentuan luas penampang kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan luas tidak lebih dari 15.000 mm² dan selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² hanya berlaku untuk pengapalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Perpanjangan masa berlaku diusulkan mengingat pasar masih belum banyak mengetahui terkait kebijakan penambahan luas penampang, karena belum tersosialisasi secara luas. Pada tahun 2022 pembahasan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2021 dilakukan dengan mengakomodir seluruh komoditas ekspor beserta usulan pemberlakuan atau pengecualian larangan terbatas ekspor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Untuk kelompok komoditi produk industri kehutanan tetap diberlakukan larangan terbatas dalam hal ini SVLK karena merupakan komitmen Indonesia dalam perdagangan global, serta implementasi pemanfaatan sumber daya hutan yang legal dan lestari. Usulan perpanjangan waktu perluasan penampang telah diakomodir dalam perubahan Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud.

Alternatif kebijakan terkait interkoneksi data dan informasi pada sistem informasi produk industri kehutanan memiliki urgensi untuk terus difasilitasi dengan mengoordinasikan KLHK, Kemenperin, Kemendag, dan Kemenkeu dikarenakan kebermanfaatannya yang luas, diantaranya pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu industri hilir dalam negeri, menciptakan tata kelola rantai pasok produk industri kehutanan secara sistem dari sektor hulu hingga hilir, serta berdampak pada peningkatan permintaan kayu bulat dari izin konsesi produksi

kayu bulat, menurunkan angka illegal logging dan perdagangan kayu ilegal di pasar domestik, dan peningkatan nilai PNBPN di sektor kehutanan.

Adapun hal-hal yang menjadi rekomendasi tindak lanjut serta upaya yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Mendorong terbitnya Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2021.
2. Melaksanakan pengendalian implementasi kebijakan perpanjangan waktu perluasan ukuran penampang produk kayu olahan tujuan ekspor pada Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2021.
3. Mendorong adanya dasar payung hukum pelaksanaan interkoneksi.
4. Mendorong penyusunan roadmap interkoneksi yang meliputi tahapan identifikasi awal keperluan data kebutuhan interkoneksi, tahap awal pembentukan proses bisnis interkoneksi, masukan dari pelaku usaha industry untuk proses pengembangan SI, pembentukan lanjutan dan kesepakatan atas alur kerja interkoneksi, rancangan alur kerja dan finalisasi TAHAP 1, dan proses digitalisasi alur kerja.

Untuk Capaian Sasaran Strategis 4 ini dari tahun ketahun sesuai dengan Rencana Aksi RPJM pada renstra Deputi PLK dapat dilihat pada table berikut :

SS	IKU	2020			2021			2022		
		RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	Persentase target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu	80%	80%	119%	80%	90%	152%	80%	90%	136%

Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian SS.4 sesuai Rencana Aksi RPJMN Deputi PLK 2020-2024

3.1.5 Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kualitas sumber daya air

Target Indeks Kualitas Air secara nasional adalah 55,30 poin dengan capaian sebesar 53,88 poin atau 97,43%. Sedangkan pada level Provinsi memiliki target IKA masing-masing, dimana terdapat 17 Provinsi yang memenuhi target dan 17 provinsi belum mencapai target. Nilai IKA secara Nasional pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,06 poin dibanding tahun 2021, yaitu 53,88 pada tahun 2021 dibanding dengan 52,82 pada tahun 2021.

Sumber daya air memiliki nilai ekonomi, ekologis, sejarah, budaya, dan hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, untuk itu menjadi penting dan urgent bagi Pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pemulihan ekosistem DAS. Untuk percepatan pengendalian kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi DAS, perlu dilakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan secara terpadu melalui berbagai upaya, salah satunya adalah melalui pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, pengawalan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan pengawalan Rencana Aksi PPK DAS Citarum.

Upaya yang dapat dilakukan guna memaksimalkan capaian target yaitu dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Air di 15 Daerah Aliran Sungai Prioritas melalui pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, pengawalan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan pengawalan Rencana Aksi PPK DAS Citarum.

Secara nasional, Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan 1,06 poin di Tahun 2022 (53,88) dari tahun 2021 (52,82), namun kenaikan tersebut masih belum memenuhi target nasional yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 55,3 poin. Terdapat peningkatan IKA pada 192 kab/kota (4.884 titik pantau), sedangkan mengalami penurunan 157 kab/kota (3.881 titik pantau). Kenaikan IKA disebabkan oleh ketersediaan anggaran serta implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil.

Sepanjang tahun 2021, beberapa upaya pengendalian pencemaran air dilakukan dengan beberapa kegiatan yakni: (a) pemantauan kualitas air sungai di 609 titik pada 90 sungai di 34 provinsi; (b) pembangunan Onlimo sebanyak 21 unit yang

tersebar di sungai Citarum (10 titik), sungai Cisadane (3 titik), sungai Bengawan Solo (3 titik), sungai Ciliwung (1 titik), sungai Cipinang (1 titik), sungai Cilamaya (1 titik), sungai Bekasi (1 titik) dan sungai Brantas (1 titik); (c) membangun fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum sebanyak 11 unit dan ekoriparian beserta fasilitas pendukungnya seperti taman terbuka hijau dan IPAL domestik; (d) pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah pada 1.948 industri; (e) pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air total sebanyak 98 unit: 56 unit IPAL domestik, 35 unit digester ternak, 6 unit IPAL Tahu dan 1 unit IPAL Batik; (f) monitoring penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air sejak 2015-2021 pada 15 DAS prioritas; (g) pemantuan effluent pada 27 unit IPAL dan 6 unit TPA di 33 Kabupaten/kota pada 6 provinsi.

Dengan pengawalan implementasi Revisi Rencana Aksi PPK DAS Citarum, hingga triwulan ketiga 2022 teridentifikasi dari pelaksanaan 12 program PPK DAS Citarum, tujuh (7) program tercapai targetnya dan empat (4) program belum tercapai. Secara garis besar permasalahan DAS Citarum dapat dibagi menjadi empat (4) aspek yaitu daya dukung air, daya dukung lahan, tata Kelola kelembagaan dan penegakan hukum. Untuk itu dalam Revisi Renaksi PPK DAS Citarum, telah diidentifikasi program-program yang berdampak langsung maupun tidak berdampak langsung. Program yang berdampak langsung merupakan program-program yang berkenaan langsung dengan penyebab pencemaran antara lain: penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, perikanan dan peternakan, penanganan limbah cair domestik, penanganan sampah, edukasi dan hubungan masyarakat. Adapun program berdampak tidak langsung merupakan penanggulangan terhadap permasalahan yang efeknya tidak berkenaan langsung dengan pencemaran badan Sungai Citarum antara lain: pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum. Sungai Citarum juga dihadapi permasalahan rendahnya kualitas performa sebagai air baku serta pengendali banjir. Pemantauan kualitas air Citarum perlu dipantau seiring dengan pelaksanaan program-program tersebut.

Melalui kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) menetapkan dan mengesahkan penanganan tiga (3) isu actual strategis dan empat (4) rekomendasi strategis yaitu:

- a. Rekomendasi Pelestarian Hutan dan Perlindungan Sumber Air;
- b. Rekomendasi Rasionalisasi Pemanfaatan Air untuk Pertanian Tanaman Pangan Beririgasi:

- c. Rekomendasi Tinjauan Peran Lubang Biopori dan Sumur Resapan untuk Mitigasi Genangan;
- d. Rekomendasi Pengelolaan Terpadu Air Permukaan dan Air Tanah.

Upaya selanjutnya, Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan merekomendasikan kebijakan sebagai berikut :

1. Sumber daya air memiliki nilai ekonomi, ekologis, sejarah, budaya, dan hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, untuk itu menjadi penting dan mendesak bagi Pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pemulihan ekosistem DAS.
2. Nilai IKA dapat ditingkatkan terutama dengan meningkatkan akses sanitasi massal (akses terhadap air bersih dan peningkatan atau pengolahan air limbah domestik). Untuk itu dibutuhkan mobilisasi anggaran baik dari pemerintah maupun sumber lainnya, implementasi kegiatan dan sosialisasi hidup bersih kepada masyarakat.
3. Selain itu, pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil bisa berdampak positif untuk meningkatkan IKA.
4. Implementasi Rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum perlu dikawal secara intens karena menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pengalokasian sumber daya (pendanaan, kelembagaan, regulasi dan aktivitas) akan menjadi lebih efektif dan efisien.
5. Perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya air harus terintegrasi dari hulu ke hilir, sebagai contoh pemeliharaan kualitas lingkungan di hulu akan berdampak besar pada perbaikan kualitas sumber daya air di hilir dimana Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagai wadah koordinasi memerlukan partisipasi aktif para anggotanya dari unsur pemerintah dan non pemerintah.

Untuk Capaian Sasaran Strategis 5 ini dari tahun ketahun sesuai dengan Rencana Aksi RPJM pada renstra Deputi PLK dapat dilihat pada table berikut :

SS	IKU	2020			2021			2022		
		RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian
Meningkatnya kualitas sumber daya air	Nilai peningkatan kualitas sumber daya air	55,1	55,1	95%	55,1	52,7	55,0	55,1	55,3	53,88

Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian SS.5 sesuai Rencana Aksi RPJMN Deputi PLK 2020-2024

3.1.6 Sasaran Strategis 6 Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah

Sampah masih menjadi permasalahan pelik di Indonesia. Data tahun 2017 menunjukkan jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65,8 juta ton/tahun (KLHK, 2017), dimana sekitar 14 % diantaranya merupakan sampah plastik dan 24% tidak terkelola dan dibuang langsung ke lingkungan. Jumlah sampah plastik yang masuk ke perairan dan terbawa sampai ke laut diperkirakan mencapai 620.000 ton pada tahun 2020 dan diprediksi menjadi 780.000 ton pada tahun 2025. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan semakin meningkatnya produksi dan penggunaan plastik, maka jumlah timbulan sampah akan semakin meningkat sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta berdampak buruk bagi kehidupan satwa dan kesehatan manusia.

Fakta yang muncul adalah banyak sampah yang dihasilkan dari aktivitas antroposentris di darat, tidak terkelola dengan baik sehingga berakhir di laut. Dari kondisi ini dapat terlihat bahwa penanganan sampah di laut tidak terlepas dari efektivitas penanganan sampah di darat agar memitigasi potensi kebocoran sampah di daratan yang dibuang ke laut. Untuk itu pemerintah di tahun 2018 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang secara tegas menetapkan target penanganan sampah di laut sebesar 70% di tahun 2025. Guna menjamin tercapainya target nasional tersebut, Kemenko Marves perlu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pengelolaan sampah baik untuk sampah yang bersumber dari darat maupun yang di laut, guna memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrument hukum pertama yang mengatur tentang persampahan, selanjutnya pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. Langkah progresif juga telah dilakukan dengan mendorong terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 mengenai Penanganan Sampah Laut. Didalam kebijakan tersebut terdapat Rencana Aksi Nasional yang menjadi dasar untuk pengurangan sampah laut sebesar 70% dan penerapan pengelolaan sampah melalui 3R hingga 30% pada tahun 2025 dengan melibatkan 16 Kementerian dan Lembaga dengan 59 kegiatan. Berdasarkan pemantauan kegiatan sampai dengan tahun 2020, dari 59 kegiatan RAN PSL, terdapat 41 kegiatan atau 69% yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Pada tahun 2022 Tingkat efektifitas Penanganan Sampah diharapkan meningkat menjadi 60%, dalam upaya pencapaian Target tersebut telah di lakukan upaya sebagai berikut :

No	Kegiatan	Progress Capaian
1	Percepatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	<input type="checkbox"/> Mendukung pencapaian target pelaksanaan Perpres 97/2017 Jakstranas melalui koordinasi percepatan penanganan sampah terintegrasi dari hulu (pembangunan TPS3R dan Bank Sampah) <input type="checkbox"/> Mendukung pelaksanaan Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Perhitungan pengurangan kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 28,5% b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan strategi penanganan sampah laut <input type="checkbox"/> Kerjasama Internasional :

		<ul style="list-style-type: none"> a. Penandatanganan dokumen Kerjasama Program Bersih Indonesia (AEPW) dan Pengelolaan Sampah (GIZ) b. Pembahasan action plan project CAPSEA
--	--	---

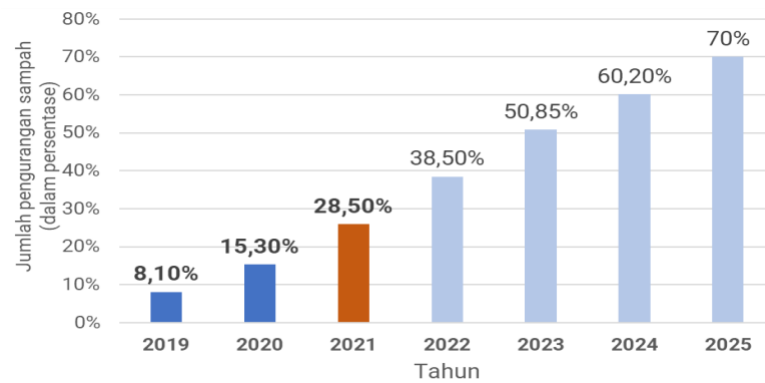
Komitmen Indonesia untuk mengurangi sampah sampai dengan 30 % melalui 3R (reduce, reuse, recycle) serta pengurangan sampah plastik di laut sampai dengan 70% pada tahun 2025 disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pertemuan di G-20 di Hamburg, Jerman tahun 2017. Komitmen tersebut selanjutnya dibakukan dalam bentuk Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Selain penetapan target pengelolaan dan penanganan sampah dan sampah laut, di dalam kedua Perpres tersebut juga telah ditetapkan strategi, program dan indikasi-indikasi kegiatan yang menjadi kewenangan K/L, Pemerintah Daerah dan institusi lainnya.

Beberapa kegiatan pengendalian implementasi kebijakan penanganan sampah laut diterapkan melalui koordinasi dengan 16 kementerian dan lembaga terkait melalui 5 (lima) strategi kebijakan dalam Rencana Aksi Nasional dengan total capaian sebesar 60,98% dari rencana kegiatan tahun 2022, dengan rincian antara lain:

- a. Strategi 1 – Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan (9/12 kegiatan);
- b. Strategi 2 – Pengelolaan Sampah yang Bersumber dari Darat (12/18 kegiatan);
- c. Strategi 3 – Penanggulangan Sampah di Pesisir dan Laut (14/16 kegiatan);
- d. Strategi 4 – Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakkan hukum (2/5 kegiatan);
- e. Strategi 5 – Penelitian dan Pengembangan (3/3 kegiatan).

Dalam 3 (tiga) tahun pelaksanaan Peraturan Presiden Penanganan Sampah laut, Indonesia mampu mengurangi kebocoran sampah ke laut hingga 28,5% dibandingkan dengan tingkat kebocoran pada tahun 2018 (Gambar 3).



Gambar 3. Jumlah kebocoran sampah laut

Kebijakan lainnya yang dapat mengurangi timbulan sampah baik di darat dan di laut, termasuk kegiatan pendukungnya, yang telah dilakukan meliputi:

- a. Integrasi pengelolaan sampah dari hulu (sedekat mungkin dari sumber) ke hilir melalui optimalisasi TPS-3R, Bank Sampah, partisipasi masyarakat, penanganan sampah terintegrasi.
- b. Pengendalian Kerusakan Lingkungan melalui koordinasi penanggulangan tumpahan minyak di laut dan pengawasan, pengendalian serta penegakkan hukum serta pemanfaatan produk samping/hasil pengolahan komoditas tambang timah untuk industry dalam negeri
- c. Optimalisasi kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Internasional di bidang pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi pengolahan sampah (SAMTAKU), serta Minderoo (doubling recycling rate), GIZ (SUP Prevention), KOICA (monitoring sampah laut), Jepang (Penanganan sampah laut).

Rekomendasi yang akan ditindaklanjuti

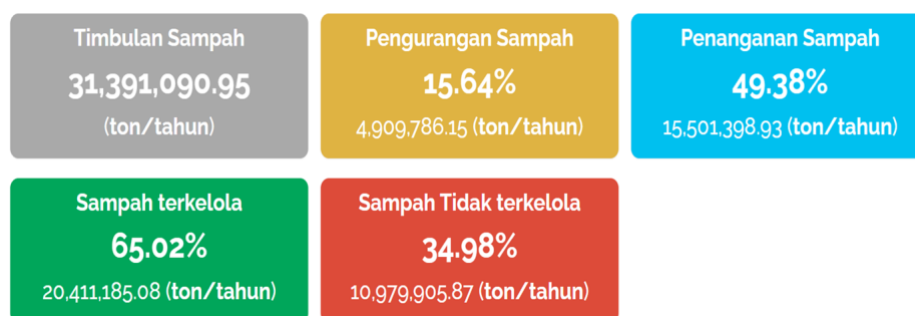
Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrument hukum pertama yang mengatur tentang persampahan, selanjutnya pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. Langkah progresif juga telah dilakukan dengan mendorong terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 mengenai Penanganan Sampah Laut. Didalam kebijakan tersebut terdapat Rencana Aksi Nasional yang menjadi dasar untuk pengurangan sampah laut sebesar 70% dan

penerapan pengelolaan sampah melalui 3R hingga 30% pada tahun 2025 dengan melibatkan 16 Kementerian dan Lembaga dengan 59 kegiatan

Sejak diundangkan pada tahun 2017, pelaksanaan Jakstranas sampai dengan tahun 2022 berdasarkan data yang masuk ke SIPSN menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai pengurangan sampah sebesar 15,64% dan penanganan sampah sebesar 49,38%, secara keseluruhan capaian pengelolaan sampah besar 65,02% dari total 100% target pengelolaan sampah di tahun 2025. Perlu digarisbawahi bahwa data capaian tersebut masih dapat meningkat, karena baru 250 kabupaten/kota se-Indonesia yang baru melaporkan data pengelolaan sampahnya ke SIPSN. Informasi mengenai pengelolaan sampah nasional dalam SIPSN sebagaimana disajikan dalam gambar 2 berikut.

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Timbulan Sampah (juta ton)	66.5	67.1	67.8	68.5	69.2	69.9	70.6	70.8
Target Pengurangan Sampah (juta ton)	12 (18%)	13.4 (20%)	14 (22%)	16.4 (24%)	17.99 (26%)	18.9 (27%)	19.7 (28%)	20.9 (30%)
Target Penanganan Sampah (juta ton)	48.5 (73%)	50.3 (75%)	50.8 (75%)	50.7 (74%)	50.5 (73%)	50.3 (72%)	50.1 (71%)	49.9 (70%)

Gambar: 1: proyek dan target pengelolaan sampah nasional berdasarkan Jakstranas.



Gambar 2. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah (sumber : sipsn.menlhk.go.id)

Dari hal tersebut, rekomendasi upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

- Mendorong implementasi pengelolaan sampah berbasis hulu dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan stakeholder terkait lainnya.
- Mendorong kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan rasio daur ulang melalui pembangunan sistem daur ulang yang menggunakan pendekatan kewilayahan untuk pemenuhan bahan baku sampah plastik.

- c) Mendorong percepatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan mengoptimalkan penanganan sampah sedekat mungkin dari sumber.
- d) Mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dan kerjasama luar negeri untuk dapat membangun infrastruktur persampahan.
- e) Mendorong kerjasama antar daerah sehingga supply-demand dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Untuk Capaian Sasaran Strategis 6 ini dari tahun ketahun sesuai dengan Rencana Aksi RPJM pada renstra Deputi PLK dapat dilihat pada table berikut :

SS	IKU	2020			2021			2022		
		RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian	RENSTRA	PK	Capaian
Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah	Tingkat Efektifitas penanganan sampah	50.48%	50.48%	136%	50.48%	60%	63,55	50.48%	60%	60%

Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian SS.6 sesuai Rencana Aksi RPJMN Deputi PLK 2020-2024

3.1.7 Sasaran Strategis 7

Terwujudnya Efektifitas Pengendalian Perubahan Iklim

Komitmen global dan kontribusi Indonesia untuk mengurangi emisi dari perubahan iklim ditunjukkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris pada tanggal 22 April 2016. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris. Pemerintah Indonesia dengan 9 (sembilan) aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawa Cita merupakan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintas-sektoral dalam agenda Pembangunan Nasional. Komitmen yang tertuang dalam Nawa Cita menjadi dasar bagi penyusunan dokumen the First Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang telah disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada bulan November 2016. First NDC Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim.

Untuk merespon masalah perubahan iklim, negara-negara dunia termasuk Indonesia menyetujui Persetujuan Paris (Paris Agreement) dimana masing-masing memberikan komitmen dan target untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2° Celcius dari masa pra-industri.

Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, Indonesia menyadari perlunya upaya maksimal untuk efektifitas pengendalian perubahan iklim. Emisi GRK sebagai indikator universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim yang direfleksikan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional, selain mempunyai nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional utamanya berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat juga sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia diperkirakan sebesar 1.8 GtCO₂e di tahun 2005. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0.4 GtCO₂e dibandingkan tahun 2000. Sumber emisi paling besar (63%) berasal dari kegiatan alih guna lahan sertakebakaran hutan dan lahan, sedangkan konsumsi bahan bakar minyak menyumbangkan emisi GRK sebesar 19% dari total emisi.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi emisi GRK. Di sektor kehutanan yang diperkirakan akan memberikan kontribusi 17,4% dari target 31,89%, telah dilakukan upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan stok karbon melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Deforestasi tahunan Indonesia yang tercatat lebih dari 3.5 juta ha untuk tahun 1996 hingga 2000 telah menurun tajam menjadi 0.44 juta hektar. Di sektor energi, yang diharapkan berkontribusi 12,5% dari target 31,89%, akan dikembangkan melalui: (1) efisiensi energi; (2) energi baru terbarukan; (3) bahan bakar rendah karbon; (4) penggunaan teknologi pembangkitan yang ramah lingkungan; dan lainnya. Bauran energi nasional dirancang untuk mencapai 23% energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Strategi EBT meliputi panas bumi, air, surya, bioenergi, dan angin. Pengembangan EBT di Indonesia akan dipercepat dan akan dibuka peluang untuk investor berpartisipasi dalam proyek EBT di masa depan.

Pada proses industri dan penggunaan produk, pengurangan emisi GRK melalui produksi yang efisien dan energi alternatif serta bahan baku. Pada sektor limbah, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kapasitas di tingkat lokal, meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah, mengurangi limbah yang dibuang ke landfill, dan

pemanfaatan limbah untuk energi.

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien dan efektif tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Untuk mendukung NEK, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan saat ini sedang dalam proses implementasi dan penyusunan peraturan turunan dari K/L terkait sebagai upaya percepatan operasional.

Data yang telah dikeluarkan oleh KLHK selaku Kementerian teknis terkait, hingga saat ini yang telah dihimpun dan dipublikasikan merupakan data tahun 2021 dengan persentase penurunan emisi GRK sebesar 47,45% dari keseluruhan target dari setiap sektor. Terjadi kenaikan capaian daripada tahun 2020 yang telah mencapai 9,63%. Sehingga terdapat kenaikan capaian sebesar 37,82% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini disampaikan KLHK dalam Laporan Inventarisasi GRK Nasional Tahun 2022. Untuk capaian pengurangan emisi GRK Tahun 2022 akan dirampungkan pada Bulan Maret Tahun 2023.

Sejalan dengan itu, Presiden juga telah menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Tahun 2022 menjadi momentum beberapa langkah percepatan dalam pengendalian perubahan iklim di Indonesia diupayakan secara efektif dalam pengembangan sumber energi alternatif dan mendukung early retirement coal power plant menjadi energi bersih. Kemenko Marves berusaha mendorong dengan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian serta pengawalan dalam percepatan penyusunan peraturan turunan oleh K/L terkait dalam persiapan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan :

Kebijakan terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Perdagangan karbon diupayakan untuk memenuhi komitmen Indonesia kepada internasional sesuai konvensi perubahan iklim yang telah diratifikasi, untuk pencapaian NDC sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan

kerja sama luar negeri pada tahun 2030. Regulasi NEK sangat penting karena menjadikan Indonesia memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar (market) di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan sehingga diperlukan adanya percepatan dalam implementasinya.

Adapun peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu sebagai ketua Komite Pengarah yang memiliki tugas memberikan arahan terkait kebijakan NEK untuk mencapai NDC dan pengendalian emisi karbon untuk pembangunan dengan anggotanya dari Kementerian/Lembaga terkait. Menteri LHK sebagai ketua bidang substansi NDC dan NEK, Menteri Dalam Negeri sebagai ketua badan koordinasi kewilayahan, dan Menteri Keuangan sebagai ketua bidang substansi fiskal dan pembiayaan.

Dalam prosesnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan percepatan implementasi Perpres Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional, melalui serangkaian rapat koordinasi level Menteri dan rapat teknis membahas substansi dan juga peraturan-peraturan turunan yang diperlukan agar operasional.

Beberapa hal-hal pokok pembahasan selama tahun 2022 yang dihasilkan, antara lain:

- Kesamaan pemahaman persepsi dalam implementasi Perpres 98/2021
- Masing-masing K/L sesuai kewenangannya telah mempresentasikan substansi yang menjadi muatan dalam Perpres 98/2001 dan telah terjadi diskusi menyamakan pemahaman terhadap narasi tersebut.
- Percepatan Penyelesaian Peraturan Turunan Perpres No. 98 Tahun 2021, yakni dalam Perpres dimaksud, terdapat 47 mandat (peraturan turunan). Terdapat 4 mandat terkait NDC dan 16 mandat terkait NEK yang akan tergabung dalam 2 PermenLHK.

Sehubungan dengan Perpres No. 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional maka perlu peraturan turunan untuk mendukung implementasi Perpres tersebut sebagai berikut:

- Telah disahkannya Permenko Marves tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan NEK-NDC Nomor 5 Tahun 2022
- Telah disahkannya Permen LHK No. 21 tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon pada tanggal 21 September 2022
- Telah disahkannya Permen ESDM tentang tata cara penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Subsektor ketenagalistrikan Nomor 16 Tahun 2022
- Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif dan DPP Pajak Karbon yang masih menunggu persetujuan DPR.
- Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon dalam proses Harmonisasi Kementerian Hukum dan Ham

Kebijakan terkait Transisi Energi

Transisi energi Indonesia merupakan bagian dari komitmen iklim global untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celcius dan Indonesia telah mengajukan LTS-LCCR (Strategi Jangka Panjang - Ketahanan Iklim Karbon Rendah) yang mencakup transisi energi untuk memenuhi emisi net zero Indonesia dengan 2060 atau lebih cepat. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik telah disahkan oleh Presiden. Pembahasan dan penyampaian penyelesaian substansi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Telah diterbitkan Kepmenko Marves No.142 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Dekarbonisasi dan Transisi Energi Nasional.

Indonesia telah menginisiasi peluncuran Country Platform Manager Pendanaan Transisi Energi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Financial Track Working Group G20 pertengahan Juli 2022 lalu. Country Platform on Energy Transition bersama Blended Finance (Carbon Reduction Fund dan Clean Energy Fund) akan menjadi wahana dan instrumen percepatan implementasi roadmap Energy Transition (Penghapusan PLTU Batubara dan Penggantian ke Energi Terbarukan) dan mobilisasi sumber keuangan/dana yang dibaurkan.

Indonesia telah mendaftarkan early retirement coal power plant dengan mempertimbangkan biaya terendah, implementasi tercepat, dan tingkat emisi tertinggi. Serta, telah diproses dalam memamerkan proyek percontohan ini dalam Presidensi

G20 Indonesia. Kemudian, akan menunda pembangunan pembangkit baru berbahan bakar batu bara termasuk proyek pipa 2,5 GW dan menambah 21 GW energi terbarukan yang merupakan 51% dari RUPTL (Rencana Umum Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030.

Indonesia memiliki potensi Energi Terbarukan yang sangat besar dan beragam untuk menghasilkan 437 GW. Upaya pengembangan Energi Terbarukan merupakan salah satu upaya dalam mendorong peningkatan capaian pengurangan emisi GRK Nasional. Indonesia sedang mencari dukungan untuk beberapa proyek Geothermal, Hydropower, Biomass, Solar dan Wind di Sumatera sebesar 1,45 GW dan di Jawa sebesar 3,4 GW yang total investasinya mencapai USD 7,4 miliar. Pemerintah Republik Indonesia memprakarsai pendirian Blended Finance Alliance (BFA) global sebagai organisasi multilateral baru dengan basis keanggotaan sukarela yang dirancang untuk menskalakan dan mereplikasi inovasi, produk, dan solusi teknologi dan keuangan untuk membuka investasi dalam aksi iklim dan SDGs termasuk transisi energi. Hal ini telah disampaikan dalam Perhelatan Presidensi G20 Bali pada November 2022 lalu.

Rekomendasi Kebijakan yang akan dilaksanakan selanjutnya

- Untuk mewujudkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional diperlukan percepatan melalui koordinasi kebijakan, langkah, serta kegiatan dalam lingkup tersebut. Peraturan-peraturan turunan sebagai mandat dari Perpres yang dipangku oleh K/L terkait telah disusun dan sedang dalam proses finalisasi hingga akhir Tahun 2022.
- Pengendalian emisi GRK dilakukan dengan kebijakan dalam pembangunan nasional, pusat dan daerah sertadari, untuk, dan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Implementasi Perpres NEK ini diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada pengurangan emisi GRK.
- Adanya regulasi NEK membuka peluang Indonesia untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim. Nilai ekonomi karbon

merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efisien dan efektif tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional.

- Transisi Energi di Indonesia perlu didorong secara intensif dan menyeluruh dari aspek kebijakan, pendanaan, kolaborasi, baik dalam hal pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagai penyediaan alternatif dalam proses early retirement coal power plant dan just energy transition. Upaya pengembangan Energi Terbarukan merupakan salah satu upaya dalam mendorong peningkatan capaian pengurangan emisi GRK Nasional.

3.1.8 Sasaran Strategis 8

Efektifitas rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien

Dalam rangka memenuhi target capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan T.A. 2022, Bersama ini kami sampaikan data 22 (dua puluh dua) Rancangan Kebijakan yang diterbitkan dan 9 (sembilan) Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sebagaimana dalam matriks terlampir.

Target capaian Rancangan Kebijakan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja adalah 50% dari 15 Rancangan Kebijakan yang direncanakan sehingga persentase capaian untuk **IKU.8 Persentase Rancangan Kebijakan yang di terbitkan, tercapai sebesar 146 %.**

Sementara untuk capaian Rancangan Rekomendasi Kebijakan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada Perjanjian Kinerja adalah 50% dari Target Capaian Rancangan Kebijakan yang diperjanjikan pada IKU.8 yaitu sebanyak 4 Dokumen Rekomendasi, Sehingga Persentase capaian untuk **IKU.9 Persentase Rekomendasi Kebijakan yang di terbitkan di Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tercapai sebesar 225%.**

Rancangan Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan yang telah diterbitkan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2023 dapat di lihat pada Matriks kebijakan berikut :

No	PIC (Asdep)	Judul Rancangan Kebijakan	Judul Rekomendasi Kebijakan
1	Asdep 1	Rancangan Peraturan PresidePerencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Perhutanan Sosial
2	Asdep 1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria	
3	Asdep 1	Rancangan Kebijakan Percepatan Pemulihan Lahan Gambut	
4	Asdep 3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara	Badan Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara
5	Asdep 3	Permenko Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan SDA	Kebijakan Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan SDA
6	Asdep 3	Kepmenko Nomor 156 Tahun 2022 Tim Pelaksana Pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional yang Berasal dari Unsur Nonpemerintah	Kebijakan Pemilihan Anggota Dewan SDA Nasional yang Berasal dari Unsur Nonpemerintah
7	Asdep 3	Kepmenko Nomor 155 Tahun 2022 tentang Panitia Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2023	Kebijakan Panitia Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2023
8	Asdep 5	1. Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukkan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik 2. Permenko Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan NEK-NDC 3. Kepmenko Nomor 142 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Dekarbonisasi dan Transisi Energi Nasional	Rumusan Efektifitas Pengendalian Perubahan Iklim
9	Asdep 5	Kepmenko Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Mitigasi dan Adaptasi Amblesan Tanah (Land Subsidence) di Dataran Rendah Pesisir dan Pengelolaan Air Tanah Tahun 2022	Rumusan Efektifitas Kesiapsiagaan dan Ketahanan Kebencanaan
10	Asdep 5	Kepmenko Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional	Rumusan Peningkatan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan Berisi Upaya Kita Dalam Mendukung Capaian Luasan Rehabilitaasi Mangrove pada Lahan Kritis 11.250 Ha
9	asdep 4	Tingkat Efeksitas Pengelolaan Sampah	
10	asdep 4	Penanganan sampah di Kota Denpasar	
11	asdep 4	Koordinasi Pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash	
12	asdep 4	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Melalui Kolaborasi Penanganan Sampah Laut	

13	asdep 4	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Melalui Penanganan Tumpahan Minyak di Laut	
----	---------	--	--

3.1.9 Sasaran Strategis 9

Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, dijelaskan bahwa kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan karena mereka adalah sebagai aparatur negara dan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mewujudkan tujuan nasional. Untuk itu perlu adanya suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata. Namun, dalam pelaksanaan penempatan pegawai tidak terlepas dari adanya suatu permasalahan. Permasalahan yang timbul seperti alokasi dan distribusi PNS yang tidak proporsional antara jumlah PNS dengan tugas dan fungsi organisasi yang harus dilaksanakan adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Penyelenggaraan manajemen PNS yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya PNS dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijakan kesejahteraan PNS, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian daerah yaitu pada sekretariat Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (Deputi 4) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor PER. 02/Tahun 2020 Tanggal 5 Maret 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, adalah unit kerja eselon satu (Eselon I) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator dan dipimpin oleh Deputi (Bab VII; Bagian Kesatu; Pasal 213; ayat 1 dan 2), dengan struktur organisasi dan tata kerja (Bab VII; Bagian Kedua; Pasal 216) yang terdiri dari:

- a. Sekretaris Deputi;

- b. Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan;
- d. Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- e. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah;
- f. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu jabatan eselon III dan IV yang telah disetarakan, termasuk jabatan fungsional lainnya.
- h. Pelaksana

Secara umum Sumber Daya Manusia yang berada dan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pembinaan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan per Desember 2022 belum ada yang berubah baik penempatan baru ataupun mutasi keluar dari Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yaitu sebanyak 76 orang.yang terdiri dari 43 PNS, 13 CPNS dan 11 TKK, 3 Pramubakti, 6 Driver

Tabel 1. Daftar PNS Lingkup Deputi PLK Per Desember 2022 Berdasarkan DUK

DAFTAR PEGAWAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN PER 30 JUNI TAHUN 2022													
NO	NAMA	NIP	LAMA MASA KERJA	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL. RUANG	TMT	Pendidikan Terakhir	Jurusan	JABATAN	JABATAN PENYETARAAN	ASAL INSTANSI	STATUS PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN													
1	Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc.	19671024 199312 2 001	28	Perempuan	Pembina Utama , IV/e	01/04/2021	S3	Biologi Laut, University of Rostock	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		BPPT	Dipekerjakan	Eselon I
2	Dirhansyah Conbul, M.Sc	19701004 200212 1 001	19	Laki-laki	Pembina Utama Muda , IV/c	01/10/2021	S2	Christian albrechts University Of Kiel, Germany	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		KKP	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon II.a
3	Sugeng Harmono, S.Hut., M.Si.	19730223 199903 1 001	22	Laki-laki	Pembina Utama Muda , IV/c	01/10/2021	S2	Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia	Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		KLHK	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon II.a
4	Mochamad Saleh Nugrahadi, S.Si., M.Sc., Ph.D.	19710313 199701 1 001	24	Laki-laki	Pembina Utama Muda , IV/c	01/10/2021	S3	Physical Oceanography, Kyushu University	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		BPPT	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon II.a
5	Rofi Alhanif, S.Pi, M.Sc	19720509 199703 1 002	24	Laki-laki	Pembina Utama Muda , IV/c	01/04/2021	S2	Coastal Management Aarhus University Denmark	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		KKP	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon II.a
6	Kus Prisetiahadi S.Pi,M.Sc,Ph.D	19700925 199503 1 001	26	Laki-laki	Pembina Utama Muda , IV/c	01/04/2021	S3	Engineering Science, Kyushu University	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		KLHK	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon II.a
7	Dr. Nurul Istiqomah, S.Pi., M.Si.	19730618 199803 2 001	23	Perempuan	Pembina Tk. I, IV/b	01/10/2017	S3	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan, IPB	Kepala Bidang Optimalisasi Tata Lingkungan, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	KKP	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
8	Ir. M. Rizal Panrelly, MTP	196911233 199403 1 010	27	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/10/2010	S2	Perencanaan Kota dan Daerah, UGM	Kepala Bidang Penanganan Limbah, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Pemda Kab. Banggai	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
9	Zainuddin, S.Hut., M.Si	19721005 200212 1 008	19	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/04/2020	S2	S2 Manajemen, Universitas Khairun Ternate	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Hutan Produksi, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Pemprov Maluku Utara	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
10	Muhammad Suhendar, S.E., M.Si	19721027 200003 1 001	21	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/10/2020	S2	Administrasi Publik, Universitas Terbuka	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	KKP	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
11	Yenung Secasari, MSc	19800203 200312 2 003	18	Perempuan	Pembina, IV/a	01/10/2019	S2	Ocean Engineering and Port Development, UNESCO-IHE Netherlands	Kepala Bidang Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	BRSDM-KKP	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
12	Agustinah, SH., MH	19730814 200112 2 004	20	Perempuan	Pembina Tk. I, IV/b	01/04/2019	S2	Magister Ilmu Hukum	Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Prov Banten	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
13	Fatma Puspitasari, S.Sos, M.Si	19790504 200312 2 001	18	Perempuan	Pembina/IV.a	01/04/2021	S2	Hukum, Universitas Indonesia	Kepala Bidang Pengendalian, Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Ombudsman	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
14	Agus Gunawan, ST, M.Eng.	19690812 199803 1 001	23	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/04/2021	S2	Material Science, Toyohashi University of Technology	Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang	Analisis Kebijakan Ahli Madya	KLHK	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
15	Harimurti, S.P., MA.	19731225 200003 1 001	18	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/04/2021	S2	School of Geography, University of Leeds, United Kingdom	Kepala Bidang Pengelolaan Lahan Gambut, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	KLHK	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
16	Rendra Kurnia Hasan, S.H., M.Env	19820927 200901 1 006	12	Laki-laki	Penata Tk. I, III/d	01/04/2019	S2	Perlindungan Lingkungan, Universitas Griffith, Australia	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	KLHK	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
17	Rita Octafiani, S.E., M.A.B	19781025 200604 2 004	15	Perempuan	Penata Tk. I, III/d	01/04/2018	S2	Kepala Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	KKP	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya	
18	La Ode Nurman Mbay, Msi	19750806 200801 1 016	13	Laki-laki	Penata Tk. I, III/d	01/04/2018	S2	Sarjana Ilmu dan Teknologi Kelautan, IPB	Kepala Bagian Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Perencana Ahli Madya		PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Perencana Madya
19	Ike Rachmawati, S.Hut	19731007 199903 2 003	22	Perempuan	Pembina, IV/a	01/04/2021	S1	Kehutanan IPB	Kepala Bidang Pengembangan Jasa Lingkungan, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Kabupaten Bungo	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
20	Farida Ahmad, SAP	19700108 198909 2 001	32	Perempuan	Pembina, IV/a	01/04/2021	S1	Ilmu Administrasi Publik, STIA LAN	Kepala Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Arsiparis Ahli Madya	Pemda NTT	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Arsiparis Madya

21	Henry Antonius Manalu, S.H., M.H	19730603 199903 1 002	22	Laki-laki	Pembina, IV/a	01/04/2021	S2	Hukum Pidana Ekonomi, UNS	Kepala Bidang Pengendalian Kebencanaan, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	KLHK	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon III.a
22	Ilham, ST,MT	19770226 200212 1 001	19	Laki-laki	Pembina, IV/a	01/12/2019	S2	Teknik Perencanaan Wilayah Universitas Diponegoro	Analisis Kebijakan Madya	Analisis Kebijakan Ahli Madya	KESDM	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Fungsional
23	Devita Safitri Nur Akbar, S.Kom, M. Env	19840705 200604 2 002	15	Perempuan	Pembina, IV/a	01/04/2021	S2	Environmental Protection, Griffith University	Kepala Bidang Jasa Pemanfaatan Karbon, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	KLHK	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Madya
24	Titim Nursiah, S.Pi., M.Si	19741113 200701 2 017	18	Perempuan	Penata Tk. I, III/d	01/10/2019	S2	Ilmu Administrasi Negara, UNIDAYAN Baubau	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Arsiparis Ahli Muda	Pemkot Baubau	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Arsiparis Muda
25	Diky Mahardika, S.Pi	19820817 201101 1 006	10	Laki-laki	Penata, III/c	01/04/2019	S1	Sosok Perikanan, IPB	Kepala Sub Bagian Pelaporan, Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Perencana Ahli Muda	Pemprov Bali	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Perencana Muda
26	Elfi Syafitri, SE	19860202 200501 2 002	16	Perempuan	Penata, III/c	01/04/2021	S1	Ekonomi, STIE Perdagangan	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Bagian Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Perencana Ahli Muda	Pemkab. Solok	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Perencana Muda
27	Achmad Kimsan. S.IP	19790409 200502 1 007	16	Laki-laki	Penata, III/c	01/04/2021	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan		Pemkot Baubau	PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Pelaksana
28	Iswati Utamiputeri, S.Si., M.T	19900314 201801 2 001	3	Perempuan	Penata Muda Tk. I, III/b	01/01/2019	S2	Teknik Lingkungan, ITB	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Fungsional
29	Nur Fajriani Falah, S.I.Kom	19931230 201801 2 001	3	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/01/2019	S1	Ilmu Komunikasi Univ Diponegoro	Analisis Data dan Informasi pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Pelaksana
30	Lusy Pebrianti, S.Si	19940216 201801 2 002	3	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/01/2019	S1	Statistika, Universitas Padjadjaran	Analisis Data dan Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Pelaksana
31	Sendy Pratiwi, S.I.Kom	19930903 201801 2 001	3	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/01/2019	S1	Ilmu Komunikasi, London School of Public Relations Jakarta	Analisis Data dan Informasi pada Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Pelaksana
32	Makna Fathana Sabila, S.Si., M.Si	19920106 201901 2 001	2	Perempuan	Penata Muda Tk. I, III/b	01/01/2019	S2	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, IPB	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Pertama
33	Tri Wahyo Rahmanto, S.Kel	19890615 201901 1 001	2	Laki-laki	Penata Muda, III/a	01/01/2019	S1	Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Pertama
34	Yoce Aprianto, S.Farm., Apt.	19930408 201901 1 001	2	Laki-laki	Penata Muda, III/a	01/01/2019	S1	Farmasi Sains dan Teknologi, UGM	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Pelaksana
35	Indira Wido Primadipta, S.T	19950604 201901 2 001	2	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/01/2019	S1	Teknik Lingkungan, ITS	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Pertama
36	Ardha Yosef Retmana, S.Kel	19910421 201901 1 001	2	Laki-laki	Penata Muda, III/a	01/01/2019	S1	Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Pertama
37	Easter Debora, S.T	19920406 201902 2 004	2	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/01/2019	S1	Teknik Lingkungan, ITS	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Pertama
38	Greisella Meiranda, S.Tr	19970511 201901 2 001	2	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/01/2019	S1	Manajemen Transportasi, Sekolah Tinggi Maritim dan Transportasi "AMNI"	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Pertama
39	Aditya Rizki Pramudita, S.H	19920731 202012 1 001	1	Laki-laki	Penata Muda, III/a	05/01/2021	S1	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Pertama
40	Jamila Rizki Nur'aini, S.Pi	19971030 202012 2 001	1	Perempuan	Penata Muda, III/a	05/01/2021	S1	Universitas Diponegoro, Jurusan Perikanan	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Kebijakan Pertama
41	Raka Panji Wibowo, S.Kom	19950408 202012 1 001	1	Perempuan	Penata Muda, III/a	05/01/2021	S1	Sistem Informasi, Universitas Gunadarma	Pranata Komputer Ahli Pratama, Bagian Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Pranata Komputer
42	Rizky Fauziah, S.Tr.M	19960605 202012 2 001	1	Perempuan	Penata Muda, III/a	05/01/2021	D4	Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung	Penyusun Bahan Kebijakan pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan			PNS Kemenko Bidang Kemaritiman	Analisis Data

Tabel 2. Daftar CPNS Lingkup Deputi PLK Per Desember 2022

DAFTAR PEGAWAI CPNS 2021 LINGKUP DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

NO	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL. RUANG	TMT	Pendidikan Terakhir	Jurusan	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Rinanda Hayoe Crusita, S.IP	19950613 202203 2 001	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Ilmu Pemerintahan	Analisis Kebijakan Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Konservasi Sumber Daya Alam
2	RR. Puspita Narastiti Aprilina H, S.H.	19980407 202203 2 003	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Hukum	Analisis Kebijakan Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Konservasi Sumber Daya Alam
3	Wahid Setiadi, S.Si.	19880811 202203 1 002	Laki-laki	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Geofisika	Analisis Kebijakan Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim Dan Kebencanaan
4	Gusti Ngurah Agung Prabawa, S.T.	19960210 202203 1 003	Laki-laki	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Teknik Geologi	Analisis Kebijakan Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim Dan Kebencanaan
5	Dhara Adhnandya Kumara, S.Si.	1998010 2202203 2 001	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Geofisika	Analisis Kebijakan Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim Dan Kebencanaan
6	Elga Tiara Putra, S.Hut	19940424 202203 1 002	Laki-laki	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Kehutanan	Analisis Kebijakan Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan Dan Jasa Lingkungan
7	Fitria Dewi Susanti, S.Hut.	19980206 202203 2 003	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Kehutanan	Analisis Kebijakan Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan Dan Jasa Lingkungan
8	Ahmad Didin Khoiruddin, S.Kel	19950720 202203 1 001	Laki-laki	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Ilmu Kelautan	Analisis Kebijakan Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Sampah Dan Limbah
9	Al Fidiashtry, S.Si.	19930126 202203 2 001	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Geografi	Analisis Kebijakan Pertama pada Asisten Deputi Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan
10	Dimas Yunus Tirtana, S.Si	19970716 202203 1 003	Laki-laki	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Geografi	Analisis Kebijakan Pertama pada Asisten Deputi Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan
11	Muhammad Kautsar, S.T.	19930125 202203 1 001	Laki-laki	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Teknik Komputer	Pranata Komputer Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Dan Kehutanan
12	Nisva Syakbania, S.Kom	19960105 202203 2 001	Perempuan	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Teknik Informatika	Pranata Komputer Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Dan Kehutanan
13	Azhari Muhammad, S.Kel.	19940604 202203 1 001	Laki-laki	Penata Muda, III/a	01/03/2022	S1	Ilmu Kelautan	Perencana Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Dan Kehutanan

Tabel 3. Daftar Tenaga Kerja Kontrak Lingkup Deputi PLK per Desember Tahun 2022

DAFTAR TTK DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN 2021								
NO	NAMA	TUGAS JABATAN	PENEMPATAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NO ID	PENDIDIKAN	TANGGAL LAHIR	UMUR
1	Debby Yolanda	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Jakarta, 04 November 1994	120000324	SMA	1994-04-11	28
2	Akrom	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	Pati, 3 Juni 1986	120000319	S1	1986-03-06	36
3	Mukhlisa Arif Hanubun	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA	Tual, 28 Agustus 1992		S1	1992-08-28	29
4	Aby Maulana Putra	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA					
5	Natrika Febriyanti	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Jakarta, 18 Februari 1990		D3	1980-02-18	42
6	Moch. Riefky Ruswondo	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Jakarta, 15 Juni 1997	120000931	S1	1997-06-15	24
7	Hilal Maulana Firdaus	Pendukung Administrasi	Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Bogor, 03 Oktober 1990	120000298	S1	1990-10-03	31
8	Nurmita Wasanda	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Jakarta, 23 November 1996	120000325	S1	1996-11-23	25
9	Alby Erlangga Aryatama	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Jakarta, 31 Januari 1995		S1	1995-01-31	27
10	Devi Rizki Indiani	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Blora, 03 Februari 1998		S1	1998-02-03	24
11	Eka Indri Saputri	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Jakarta, 16 November 1993		S1	1993-11-16	28

Pada Tabel 1 tentang data PNS lingkup Deputi PLK per Desember Tahun 2022 terdiri dari Pejabat Eselon I yaitu Deputi PLK, Eselon 2 sebanyak 5 yaitu sekretaris Deputi, dan 4 Asisten Deputi . untuk Pejabat Eselon III yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional telah terisi sebanyak 17 jabatan (15 Analis Kebijakan Ahli Madya, 1 Analias Perencana Ahli Madya, 1 Arsiparis Ahli Madya), dan eselon IV yang telah disetarakan adalah 3 jabatan yang terisi (2 Analis Perencana Ahli Muda, 1 Arsiparis Ahli muda), 6 pejabat fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama dan sisanya adalah pejabat pelaksana yang terdiri dari PNS dan CPNS 2021.

Pada Tabel 2. Data tentang CPNS yang ditempatkan terhitung pada 1 Januari 2022 menjelaskan tentang jumlah CPNS yang ditempatkan di Deputi PLK dan telah terdistribusi pada keasdepan sebanyak 10 orang dan kesekretariatan sebanyak 3 orang. CPNS lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan belum mengikuti Latihan Dasar Tahun Anggaran 2022

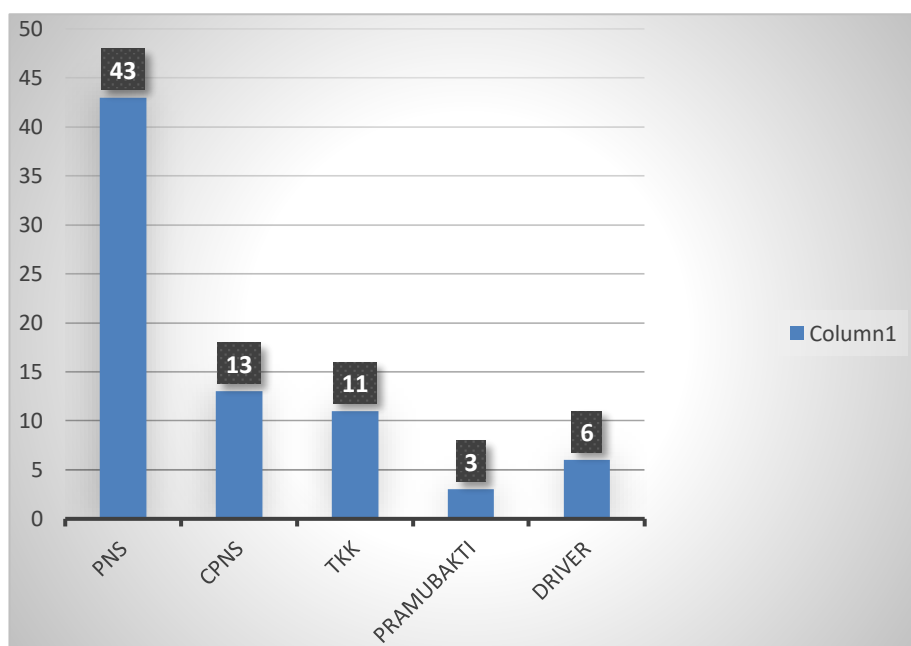
Pada Tabel 3 tentang data tenaga kerja kontrak sejumlah 11 orang yang terdistribusi pada keasdepan dan kesekretariatan. Oleh karena keterbatasan SDM pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan terutama pada pendukung administrasi maka melalui Sekretaris Deputy telah melakukan Pengajuan Tenaga Kerja Kontrak untuk Tahun 2022 sesuai dengan data Eksisting dan tidak ada penambahan, menunggu hasil validasi dan keputusan terkait penghapusan tenaga Kontrak Kerja pada Tahun 2023.

Untuk jumlah keseluruhan sumber daya manusia di Deputy PLK sebanyak 76 orang dengan penambahan 3 orang Pramubakti dan 6 orang driver yang diperkirakan saat ini telah memenuhi jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja baik pada kesekretariatan maupun pada keasdepan lingkup Deputy PLK.

Tabel 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Deputy PLK Per Desember 2022

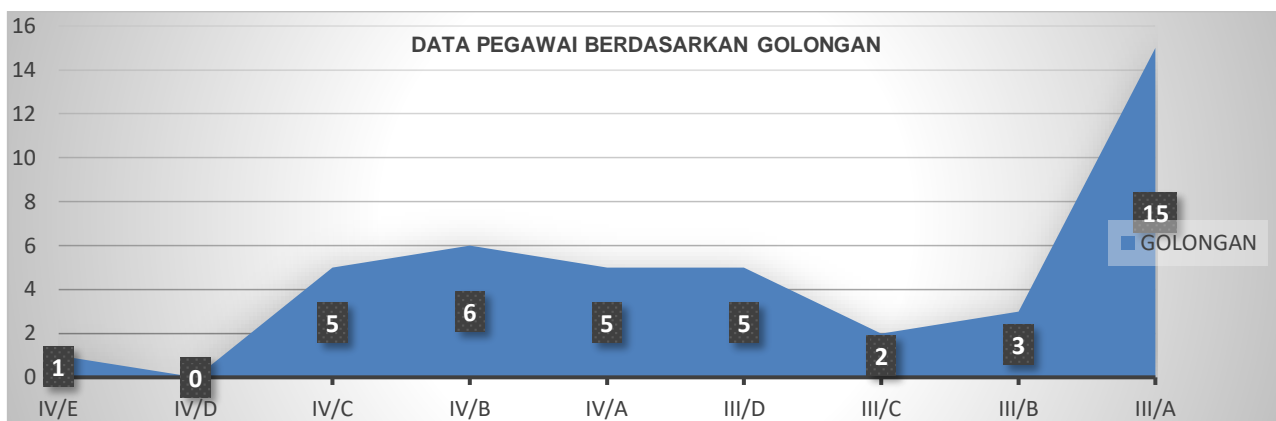
STATUS JABATAN	JUMLAH (ORANG)
PNS	43
CPNS	13
TKK	11
PRAMUBAKTI	3
DRIVER	6
JUMLAH	76

Tergambar dalam diagram berikut :



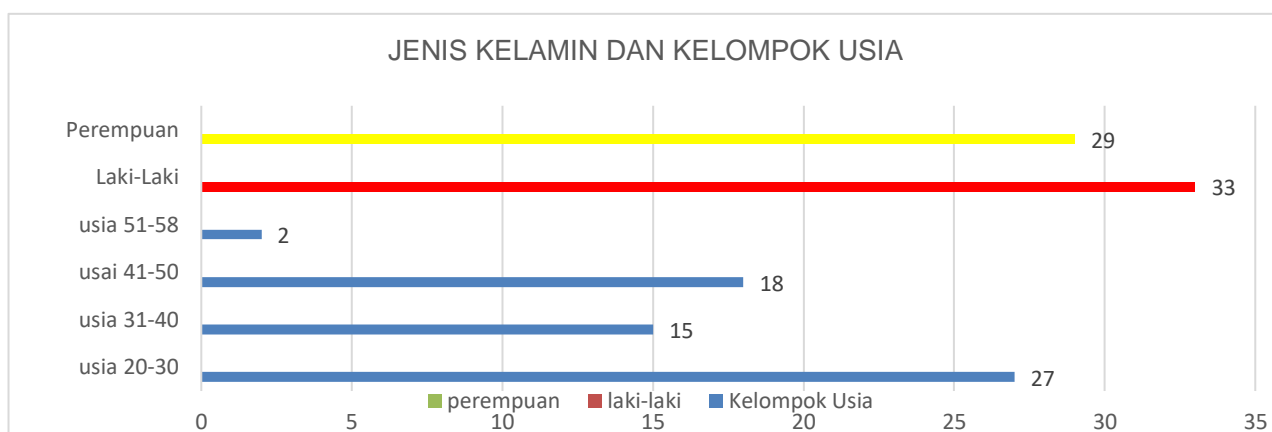
Tabel 5. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang

No	Jumlah PNS	Golongan/Ruang								
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a
1	43 Orang PNS	1	-	5	6	7	4	3	2	14
2	13 Orang CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	13



Tabel 6. Data SDM berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

No	Jumlah PNS	Jenis Kelamin		Kelompok Usia			
		L	P	20-30	31-40	41-50	51-58
1	76 Orang	41	35	33	18	18	7



Sehubungan dengan hal tersebut diatas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah menyusun Anjab dan ABK pasca penyederhanaan birokrasi dan akan diikuti dengan penambahan dan penempatan pegawai untuk mengisi jabatan fungsional madya, fungsional muda, fungsional pertama dan pelaksana pada beberapa jabatan yang dianggap masih membutuhkan sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja pasca penyederhanaan birokrasi tersebut.

Dalam rangka mewujudkan ASN yang kompeten, diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap ASN sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari standar kompetensi teknis, standar kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Tabel 9. Jenis Kompetensi Pegawai yang berlangsung sampai pada Desember 2022

DAFTAR DIKLAT/WORKSHOP PEGAWAI DEPUTI PLK TA. 2022					
NO	NAMA PEGAWAI	JENIS /TEMA DIKLAT/WORKSHOP	TEMPAT	DURASI/WKT	KET
SEKRETARIAT					
1.	Farida Achmad	Workshop Fotografi dan Bimbingan Teknis Integrasi Standar Pelayanan Terpusat	Bogor	11 - 13 April 2022	Diklat Teknis
2.	La Ode Nurman	Manajemen SPBE	Bekasi	28 - 30 Maret 2022	Diklat Manajerial
3.	Nisva Syakbania	1. Manajemen SPBE	Bekasi	28 - 30 Maret 2022	Diklat Manajerial
		2. Workshop Fotografi dan Bimbingan Teknis Integrasi Standar Pelayanan Terpusat	Bogor	11 - 13 April 2022	Diklat Teknis
		3. Seminar on Manufacturing and Industry 4.0 for Indonesia	Online	16 - 29 September 2022	Diklat Teknis
4.	Muh. Kautsar	1. Manajemen SPBE	Bekasi	28 - 30 Maret 2022	Diklat Manajerial
		2. Workshop Fotografi dan Bimbingan Teknis Integrasi Standar Pelayanan Terpusat	Bogor	11 - 13 April 2022	Diklat Teknis
		3. Seminar on Manufacturing and Industry 4.0 for Indonesia	Online	16 - 29 September 2022	Diklat Teknis
5.	Rizky Fauziyah	Procurement and STEP Training Mangroves for Coastal Resilience Project	Hotel Mercure Sabang, Jakarta	6 Oktober 2022	Diklat Teknis
6.	Raka Panji Wibowo	1. Pelatihan Born To Defense Kelas Ke-12,	Online	31 Oktober - 2 November 2022	Diklat Teknis
		2. Seminar on Manufacturing and Industry 4.0 for Indonesia	Online	16 - 29 September 2022	Diklat Teknis
ASDEP 1					
-					
ASDEP 2					
1.	Ike Rachmawati	Workshop koordinasi FIP-2	Bogor	22-Mar-22	Diklat Teknis
2.	Elga Tiara Putra	Workshop koordinasi FIP-2	Bogor	22-Mar-22	Diklat Teknis
ASDEP 3					
1.	Tri Wahyu Rahmanto	Water Resources Recycling: Management on Medical Quality Workshop on Water Circulation	Taiwan	4 s.d 17 Oktober 2022	Diklat Teknis
ASDEP 4					
1.	Muh Suhendar	Penanganan Sampah di Laut	Bali	23 - 26 Maret 2022	Diklat Teknis
2.	Aditya Pramudita	Penanganan Sampah di Laut	Bali	23 - 26 Maret 2022	Diklat Teknis
3.	Natrika Pebrianti	Penanganan Sampah di Laut	Bali	23 - 26 Maret 2022	Diklat Teknis
4.	Didin Khoiruddin	Workshop Capacity Buliding Ekonomi Sirkular	Cibubur	28 - 30 Maret 2022	Diklat Teknis
5.	Rendra Kurnia Hasan	Green Transition: Circular Economy and Environmental Sustainability 2022" Danida Fellowship Centre Scholarship Programme di Conpenhagen dan Aarhus,	Denmark	22 Agustus - 9 September 2022	Diklat Teknis
ASDEP 5					
1.	Rita Oktafiani	Workshop Middle East and Nort Africa (MENA) Climate week	Dubai, UEA	27 Maret - 1 April 2022	Diklat Teknis
2.	Indira Wido Primadipta	Article 6.2 Capacity Building Workshop for ASEAN Member States	Singapura	28 September - 1 Oktober 2022	Diklat Teknis
3.	Iswiati Utami Puteri	Green Transition: Circular Economy and Environmental Sustainability 2022" Danida Fellowship Centre Scholarship Programme di Conpenhagen dan Aarhus,	Denmark	22 Agustus - 9 September 2022	Diklat Teknis

Beberapa kendala dan hambatan yang ditemui selama melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkup Deputi Bidang Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan adalah :

1. Perubahan SOTK dan penyederhanaan birokrasi sangat berpengaruh dalam penyusunan Anjab dan ABK serta SOP kedeputian;
2. Belum lengkapnya dokumen kepegawaian PNS, menyebabkan :
 - a. Data kepegawaian pada Aplikasi MarvesHR tidak lengkap
 - b. Belum termonitornya kenaikan gaji berkala
 - c. Belum selesainya Perpindahan gaji beberapa pejabat baru dari tempat asal
3. Sistem penyampaian berkas/dokumen kenaikan pangkat, gaji berkala, pemberian penghargaan dan cuti oleh Bagian Kepegawaian langsung disampaikan kepada PNS yang bersangkutan sehingga Bagian Ketatausahaan dan Pelaporan Sekretariat Deputi IV kesulitan untuk memperbaharui data kepegawaian dan pembuatan laporan triwulan dan tahunan.
4. Kebijakan moratorium oleh Kemenko Marves terhadap penerimaan mutasi pegawai baik dari instansi daerah maupun vertikal sangat berpengaruh kepada pemenuhan jumlah kebutuhan pegawai yang ada saat ini dengan beban kerja yang begitu tinggi khususnya masing-masing jabatan pelaksana pada unit keasdepan, dan pelaksana pada kesekretariatan.
5. Pelatihan yang diadakan oleh kementerian atau Lembaga terkait lebih kepada pelatihan teknis yang tidak sejalan dengan tugas dan fungsi kemenko marves;
6. Masih kurangnya kesadaran PNS dalam mengisi presensi kehadiran pelaksanaan tugas bekerja di kantor (WFO) menggunakan Aplikasi Absensi Online maupun manual yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam rekapitulasi kehadiran.

3.1.10 Sasaran Strategis 10

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif

Untuk capaian Sasaran Strategis 11 ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, seperti Tabel Berikut :

SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	>75	70,75
		12	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	85	93,94

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat luas, seluruh instansi pemerintah mulai melakukan berbagai program pengelolaan pemerintah. Perkembangan pengelolaan pemerintah ini dilakukan agar mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang baik menuju kondisi *good governance* dalam pengelolaan pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam mencapai *good governance* adalah program reformasi Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional.

Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam program reformasi birokrasi Lingkup Deputi PLK terdapat 8 (delapan) area perubahan yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Melaksanakan perubahan tata kelola organisasi dengan menganut nilai-nilai PATEN untuk peningkatan kinerja organisasi

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan menurunkannya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada di lingkup kementerian yang berada dibawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Meningkatkan efektivitas organisasi instansi pemerintah yang proposional, tepat fungsi, tepat ukuran, serta tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi internal instansi.

4. Penataan Tata Laksana

Meningkatkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Menciptakan SDM aparatur berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.

6. Penguatan Akuntabilitas

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.

7. Penguatan Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

8. Penguatan Pelayanan publik

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, maka reformasi birokrasi di lingkungan Deputi PLK berfokus pada delapan area perubahan yang harus dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja Pokja RB Tahun 2022. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi PLK secara berkala.

Adapun capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan berdasarkan **hasil penilaian Penilaian Mandiri PMPRB Lingkup Deputi PLK tanggal 21 Mei 2022 pada Aplikasi**

RB Kemenko Marves, dengan capaian nilai RB Unit adalah sebesar 33,82 (93,94%) atau dikategorikan “Baik”, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Deputi PLK dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran atau kriteria keberhasilan dari program/kegiatan Manajemen Perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi/RB yang melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim RB.
- Tersedianya peta jalan/road map RB yang telah diformalkan mencakup 8 area perubahan dan “quick wins”.
- Terbentuknya dan terselenggaranya pemantauan dan evaluasi RB melalui program dan kegiatan Tim Asesor-Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB.
- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kinerja mulai dari pimpinan dan seluruh staf di lingkungan Deputi PLK diantaranya melalui pembentukan dan pengimplementasian agent of change dan role model di setiap unit kerja.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada area manajemen perubahan pada tahun 2020 ini adalah:

- a. Ditetapkannya Kelompok Kerja Penguatan RB dan Pembangunan ZI Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2021;
- b. Tersusunnya Rencana Kerja Pokja RB dan Pembangunan ZI Tahun 2022 dalam rangka penguatan implementasi RB tanggal 17 Pebruari 2022 dan telah disesuaikan dan menyelaraskan kembali dengan Renja RB Setmenko pada tanggal 31 Maret 2022;

- c. Tersosialisasikannya Rencana Kerja Pelaksanaan RB dan ZI Lingkup Deputi PLK yang disampaikan kepada seluruh Tim Kelompok Kerja melalui Nota Dinas Sekretaris Deputi;
- d. Terbentuknya Tim AOC Lingkup Deputi PLK Tahun 2022 dan telah diusulkan ke Biro Hukum tanggal 4 Februari 2022;
- e. Terlaksananya kegiatan pemilihan AOC Teladan Tahun 2021 lingkup Deputi PLK melalui penyebaran link survey tanggal 21 Januari 2022 dan Wawancara pada tanggal dan penetapan AOC Teladan terpilih yang telah diusulkan ke Biro Hukum pada tanggal 4 Februari 2022;
- f. Tersusunnya Rencana Kerja Agen Perubahan (AOC) Tahun 2022 sesuai Nota Dinas No. 094/DIV.0/Marves/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022;
- g. Terbentuknya Tim Assesor PMPRB dan Operator Aplikasi RB Deputi PLK Tahun 2022 yang diusulkan kepada Deputi RB dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen-PANRB sesuai surat No. 104/D.IV/Marves/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022;
- h. Terlaksananya penguatan Tim Pokja Deputi PLK melalui kegiatan kunjungan dan studi banding pelaksanaan pembangunan zona integritas di Pusat Perencanaan dan Pembangunan SDM, KLHK di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2021, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2021, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan, KLHK di Yogyakarta pada tanggal 31 Maret 2021; serta dengan Inspektorat Kemenko Perekonomian RI pada tanggal 27 Juli 2022 melalui Video Coference.
- i. Terlaksananya Penilaian Mandiri PMPRB Lingkup Deputi PLK tanggal 21 Mei 2022 pada Aplikasi RB Kemenko Marves, dengan capaian nilai RB Unit sebesar 33,82 (93,94%) sesuai rapat evaluasi Tim RB Kemenko tanggal tanggal 13 Juni 2022;

NILAI PMPRB UNIT KERJA			
Unit Kerja	Nilai PMPRB 2020	Nilai PMPRB 2021	Nilai PMPRB2022
Deputi 1	33,25	30,26	32,59
Deputi 2	33,63	33,11	33,58
Deputi 3	32,83	31,35	32,66
Deputi 4	34,13	32,80	33,82
Deputi 5	32,24	31,24	32,77
Deputi 6	32,29	31,60	33,34
Setmenko	32,25	32,98	33,09
Pusat	86,59	85,80	87,26
NILAI PMPRB PUSAT			
Kemenko Marves	Nilai PMPRB2020	Nilai PMPRB2021	Nilai PMPRB2022
	86,28	85,11	86,60

- j. Terlaksananya sharing session “Strategi Pembangunan ZI menuju ZI-WBK dan WBBK” Deputi PLK dengan Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas di Hotel Avenzel Bekasi tanggal 3 Juni 2022;
- k. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Deputi PLK Tahun 2022 secara berkala/Triwulan.
- l. Tersusunya Laporan evaluasi pelaksanaan RB Deputi PLK Tahun 2022 Triwulan I, II, III dan IV.
- m. terselesaikannya penyusunan dan penyampaian kertas kerja pengelolaan SAKIP Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 ke Biro Perencanaan pada tanggal 7 Juli 2023.
- n. Melakukan rapat koordinasi internal dan evaluasi progress capaian kerja AOC Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tanggal 4 Agustus 2022 di ruang rapat It.8.
- o. Tercapainya target kinerja Agen Perubahan/ AOC Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022.
- p. Terselesaikannya pelaksanaan program prioritas dan quick wins Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022 sesuai Nota Dinas Nomor:254/D4/PR.02.06/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Capaian Program Prioritas dan Quick Wins.

Matriks Laporan Capaian Program Prioritas/Quick Wins Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022										
NO	UNIT KERJA PENGELOLA	PROGRAM PRIORITAS	TARGET	PROGRES CAPAIAN	% CAPAIAN	OUTPUT YANG DIHASILKAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENHAMBAT	SUCCESS STORY	TINDAK LANJUT
1	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Pengelolaan Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Telah tersusun konsep batang tubuh dan rencana aksi Telah terlaksana proses konsultasi publik dan harmonisasi 	100	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dari kalangan sipil dan masyarakat dalam menjangkau informasi dan masukan pada tingkat lebih awal Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam penyusunan RPPres Dukungan anggaran dari pihak ketiga kepada Kementerian LHK untuk pelaksanaan kegiatan RPPres Dukungan dari LSM/NGO yang membantu masukan ke dalam RPPres 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi dari kalangan sipil dan masyarakat untuk mengikut kegiatan koordinasi Rugulain dalam pelaksanaan kegiatan saat ini Dukungan anggaran bagi Kemendagri dalam koordinasi dan fasilitasi kegiatan Dukungan anggaran bagi Kemenlu dalam implementasi kegiatan Perhutanan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Musyawarah intensif dan partisipasi dari kalangan sipil, Masyarakat, LSM, NGO, hingga Perguruan Tinggi dalam mendukung sinkronisasi program dan proses perhandataran/ pengesahan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Pengelolaan Perhutanan Sosial Fasilitasi dan koordinasi memenuhi target waktu penyusunan 	Hasil harmonisasi ikhtisadiah kepada jarkawasa (RHK) untuk disempatkan kepada Kementerian dan proses perhandataran/ pengesahan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
2	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi Hulu Hilir	Tersusunnya Dokumen Strategi Nasional Pengembangan Bambu	<ul style="list-style-type: none"> Final Draft Strategi Nasional Pengembangan Bambu terintegrasi Hulu Hilir 	100	Final Draft Strategi Pengembangan Bambu terintegrasi Hulu Hilir	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dan sinergi baik dari K/L, terkait, Masyarakat, swasta, perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya rencana jangka panjang terkait bambu dalam dokumen perencanaan 	Adanya ketepatan-ketepatan yang menjadikan bambu sebagai HHDK unggulan dan potensial	Penyusunan narasi dan papung hukum yang akan mengacu implementasi

- q. Terlaksananya dan tersusunnya laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022 secara berkala (Triwulan).
- r. Tersusunnya Pedoman pemberian reward Agen Perubahan dan terbentuknya Tim Penilai Pemilihan Agen Perubahan teladan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022 sesuai Nota Dinas Nomor: 847/D.IV/KP.04.07/X/2022.
- s. Tersosialisasikannya budaya kerja Ber-AKHLAK lingkup Deputi PLK dengan metode kreatif melalui pemasangan poster di ruang kerja lt.8;



- t. Terlaksananya internalisasi core values BerAKHLAK dan Pengembangan Karakter Pokja RB Deputi PLK Tahun 2022 Tanggal 2 Oktober 2022.



- u. Benchmarking Reformasi Birokrasi Khususnya pada Area Penataan Tata Laksana, Area Penguatan Pengawasan dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP), Kementerian Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah – DIY dan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakartapada tanggal 21-22 November 2022 di Yogyakarta



2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program penataan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam rangka pencapaian regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Peningkatan nilai pada area Penataan Peraturan Perundang-undangan di antaranya disebabkan oleh beberapa capaian, seperti: (i) identifikasi kajian perundang-undangan bidang lingkungan dan kehutanan, (ii) identifikasi dan analisis terhadap seluruh peraturan perundangundangan bidang lingkungan dan kehutanan yang tidak harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya, (iii) tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan, dan (iv) sosialisasi peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 dalam rangka identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundangan dibidang lingkungan dan kehutanan sebagai berikut:

- a. Tersusunnya identifikasi peta keterkaitan peraturan-peraturan yang telah mengalami perubahan (direvisi/dicabut) yang dikoordinasikan oleh Deputy PLK sesuai nota dinas No. 60/DIV/Marves/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022.



b. Terlaksananya pemantauan terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait lingkungan dan kehutanan yang dikoordinasikan Deputy PLK dengan peraturan-peraturan pengganti antara lain:

- Peraturan Menteri Perdagangan No. 2 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; (status peraturan: sudah diperbarui menjadi Permendag No.8/2022);
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (status peraturan: sudah diperbarui menjadi Permendag No.12/2022);
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag ini berlaku terhitung sejak 20 Maret 2022 hingga saat ini);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional;
- Rancangan Peraturan Presiden JakNas terbaru diundangkan, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana telah diubah dengan P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1137) yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 52, Pasal 88 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sesuai dengan isu-isu yang dikoordinasikan Deputi PLK meliputi garis besar hal-hal dalam UU SDA sebagaimana dirubah dengan
- d. UU Cipta Kerja adalah pemetaan dalam sektor tata kelola air antara makna publik dan privat harus tepat, porsi yang besar terhadap bagi tata kelola air oleh negara/daerah harus dipergunakan sebesarbesarnya untuk kepentingan rakyat, dan harus memberikan porsi terhadap air sebagai bagian yangtak terpisahkan dari keseluruhan ekosistem.
- e. Terlaksananya harmonisasi di Kemenkumham dan telah ditetapkan Permenko No.6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Permenko No 8 Tahun 2018 tentang Tata kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Perencanaan dan kerusakan DAS Citarum.
- f. Terlaksananya harmonisasi di Kemenkumham dan telah ditetapkan Permenko No.12 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Permenko No 8 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air.
- g. Terlaksananya harmonisasi di Kemenkumham dan telah ditetapkan Permenko No.5 Tahun 2022 tentang Struktur Dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

- h. Terlaksananya harmonisasi di Kemenkumham dan telah diterbitkannya PermenSDM No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Subsektor Pembangkit tenaga Listrik.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi yang lebih optimal dengan organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Keberhasilan pencapaian nilai RB pada area penataan dan penguatan organisasi di antaranya disebabkan oleh beberapa capaian, adalah telah dilakukannya reviu terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja, evaluasi organisasi dan pengajuan perubahan organisasi di Lingkup Kemenko Marves pada Tahun 2021, serta optimalisasi Sistem Informasi Terintegrasi serta penyiapan sadara prasarana dan penunjang lainnya. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada area penataan dan penguatan organisasi Tahun 2022 ini adalah :

- Terlaksananya koordinasi tindak lanjut dengan Biro Hukum terkait evaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan Tahun 2021 melalui FGD pengukuran kesehatan budaya organisasi (OCHI 4.0) tanggal 23 Maret 2021 di Hotel 101 Dharmawangsa Jakarta Selatan dan rapat evaluasi kelembagaan; rapat pembahasan evaluasi jabatan lingkup Kemenko Marves berdasarkan Permenpan RB No.34 Tahun 2011 agar nilai kelas jabatan dapat sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab setiap jabatan yang dilaksanakan secara virtual tanggal 1 Agustus 2022.
- Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai dalam rangka penataan dan penguatan organisasi melalui keikutsertaan pegawai dalam berbagai bimtek, sosialisasi dan workshop lingkup kemenko Marves antara lain:
 - a. FGD pengukuran kesehatan budaya organisasi (OCHI 4.0) tanggal 23 Maret 2021 di Hotel 101 Dharmawangsa Jakarta Selatan.
 - b. sosialisasi virtual pengisian survei pengukuran kesehatan budaya kerja organisasi (OCHI) dan melakukan pengisian survei tanggal 18 Februari 2021 lingkup Deputi PLK
 - c. sosialisasi evaluasi kelembagaan dan bimbingan teknis penyusunan evaluasi kelembagaan pada tanggal 18 Juli 2022 di ruang rapat It.4.

d. sosialisasi Kebijakan Pengembangan Jabatan Fungsional Pasca Penyederhanaan Birokrasi terkait ditetapkannya Permenpan RB No.6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN pada tanggal 18 Agustus 2022 secara virtual.

- Terlaksanannya evaluasi kelembagaan Deputy PLK pada tanggal 22 Desember 2022 dengan nilai peringkat komposit 73,97 (P-4) yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	14.773	41%
Formalisasi	8.9286	29%
Sentralisasi	10.227	18%
TOTAL	33.929	32%
Alignment	8.75	13%
Governance and Compliance	8.2143	18%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	7.5	25%
Manajemen Risiko	7.0833	29%
Teknologi Organisasi IT	8.5	15%
TOTAL	40.048	20%
Peringkat Komposit	73.97619048	



Telah tersusunya matriks identifikasi dan analisis terkait tugas dan fungsi yang tumpang tindih di Deputy PLK sebagai berikut:

Bidang/Unit Kerja	Hasil identifikasi terjadinya tumpang tindih
Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan (PKL) di Asdep Pengelolaan Sampah dan Limbah yang cakupan terminologinya terlalu luas	<p>a. Cakupannya terlalu luas. Terminologi "Kerusakan" berdasarkan UU 32/2009, kondisi suatu ekosistem yang memenuhi Kriteria Baku Kerusakan LH (KBK-LH), seperti KBK-LH Ekosistem Gambut (PP 71/2014 jo. PP 57/2016), dan Kerusakan Ekosistem Akibat Pertambangan.</p> <p>b. Fungsi PKL tersebut bertalian erat dengan penugasan kepada A5 (ekosistem gambut) dan A2 (pemulihan lahan bekas tambang).</p>
Asdep Pengelolaan Sampah dan Limbah	<p>a. Terkait dengan Koordinasi Penanganan Sampah Laut. D4, c.q. A4 mengoordinasikan hal teknis pelaksanaan RAN-PSL. Sementara AIS Forum (Archipelagic and Island States) yang salah satu topiknya membahas pengendalian polusi laut (termasuk Marine Debris) dikoordinasikan oleh Kedeputian lain. Belajar dari AIS Forum 2022, D4 tidak terlibat dalam pembahasan, sehingga membuka potensi inkonsistensi deliverable statement oleh Menteri, khususnya terkait penanganan sampah laut.</p>
Asdep Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan (Jasling)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nomenklatur A2 mengenai Jasa Lingkungan (jasling) sangat luas. Ada 4 jenis jasling yakni <ul style="list-style-type: none"> a. jasling tata air, b. jasling keanekaragaman hayati, c. jasling penyerapan karbon, dan d. jasling keindahan lanskap.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan jasling tersebut, di KLHK merupakan urusan Ditjen KSDAE yang merupakan mitra kerja A3. Untuk bisa mengkoordinasikan isu-isu yang belum dikoordinasikan oleh Asdep lain, maka di A2 ditambah isu hasil hutan

<p>Asdep Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asdep 1, satu fungsi (fungsi penataan kawasan hutan) memang di bidang kehutanan, namun dua fungsi merupakan bidang lingkungan hidup, yaitu fungsi tata lingkungan dan fungsi pengendalian kawasan gambut. Namun Asdep Satu dimasukkan full ke dalam KRO Kebijakan Bidang Kehutanan. Berdasarkan tiga fungsi di Asdep Tiga, terdapat satu fungsi yaitu konservasi SDA yang lebih dekat dan banyak terkait dengan isu bidang kehutanan, namun seluruh kegiatan Asdep Tiga masuk dalam KRO Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. Seharusnya tugas fungsi berdasarkan permen tentang Orta sejalan dengan pembagian KRO dan output kegiatan yang akan keluar pada KRO nya.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IKLH merupakan indeks yang digunakan oleh Kemenkomarves sebagai sasaran strategis organisasi. Artinya sebaiknya struktur organisasi mencerminkan fungsi untuk mencapai sasaran strategis tersebut. IKLH terdiri dari 4 indikator yang beberapa indikator didalamnya mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran, baik air, udara dan air laut. Namun dalam fungsi keasdepan di Deputi 4 tidak ada yang mencerminkan pengendalian pencemaran, walaupun ada fungsi yang menangani terkait air. Dan di dalam fungsi keasdepan di Deputi 4 tidak ada yang mencerminkan fungsi pengendalian pencemaran udara. Walaupun ada asdep yang menangani limbah, namun secara substansi penanganan limbah berbeda dari substansi, sumber, proses dan instrumen pengelolaannya.

- Tersusunnya bagan Struktur organisasi dan peta jabatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sesuai Nota Dinas

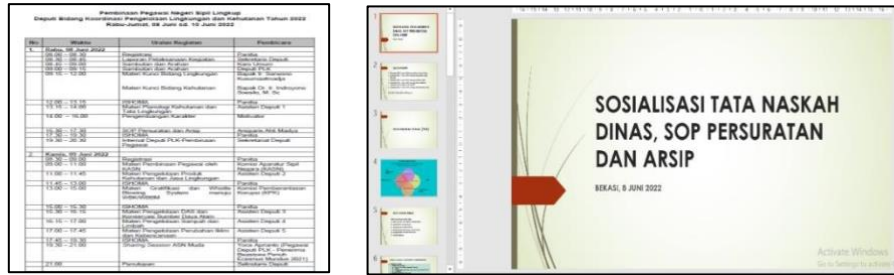
Nomor: ND 078 / D4.0/MARVES/IV/2022 Tanggal 04 April 2022 tentang Usulan Kebutuhan Jabatan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

4. Penataan Tatalaksana

Program penataan tatalaksana dilakukan agar sistem, proses, dan prosedur kerja jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai prinsip good governance. Keberhasilan pencapaian nilai RB pada area Penataan Tatalaksana di antaranya adalah terlaksananya penyederhanaan birokrasi dengan diterbitkannya Permenko No. 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves, tersusunnya Kamus Kompetensi Teknis dan SKJ bagi JPT Kemenko Marves serta telah terlaksananya pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional pada bulan Desember 2021. Adapun kegiatan pada area penataan tatalaksana pada tahun 2022 adalah :

- a. Terbentuknya Tim/Pengelola Arsip dan uraian tugasnya di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022 sesuai Nota Dinas pada bulan Maret 2022.
- b. Tersusunnya draft Kamus Kompetensi Teknis bagi JPT lingkup Deputi PLK dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum sesuai Nota Dinas Nomor : 0039/DIV.0/Marves/II/2021 tanggal 25 Februari 2021;
- c. Tersusunnya Draft Anjab dan ABK lingkup Deputi PLK yang telah disampaikan kepada Kepala Biro Hukum sesuai Nota Dinas Sesdep No: ND.0020/DIV.0/Marves/II/2021 Tanggal 3 Februari 2021 dalam rangka penyusunan proyeksi kebutuhan jabatan pasca kebijakan Penyederhanaan Birokrasi;
- d. Tersusunnya draft KAK pengembangan Kapasitas SDM lingkup Deputi Bidang Koordinasi pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2021;
- e. Tersusunnya Draft KAK Pengadaan TTK Teknis/Substansi yang ditujukan kepada Kepala Biro Umum sesuai Nota Dinas Sesdep PLK No : ND.0014 /D.IV.0/ Marves/I/2021 Tanggal 27 Januari 2021, sebagai bahan masukan kepada Biro Umum dalam pengadaan TTK Teknis/Substansi lingkup Kemenko Marves;
- f. Tersusunnya penyesuaian Matriks Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama Lingkup Deputi PLK Tahun 2021;

- g. Terlaksananya sosialisasi Tata Naskah, SOP Persuratan dan Arsip Lingkup Deputi PLK kepada PNS Tahun 2021 dan CPNS Tahun 2022 di Hotel Avenzel Bekasi Tanggal 8 Juni 2022 pada kegiatan Pembinaan CPNS;



- h. Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi Aplikasi SRIKANDI lingkup Deputi PLK tanggal 18 April 2022 di ruang rapat lt.4 gd. Kemenko Marves dan sosialisasi dan internalisasi Aplikasi SRIKANDI kedua lingkup Deputi PLK tanggal 27 Juni 2022 di Hotel Salak Heritage;



- i. Terlaksananya penataan arsip Deputi PLK tanggal 10 Juni 2022 di ruang rapat lt.8 dengan pendampingan Tim ANRI;



- j. terselesaikannya draft Manajemen Risiko SPBE Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tahun 2022 dan telah disampaikan kepada Biro Komunikasi untuk dapat ditindaklanjuti pada tanggal 19 September 2022.

- k. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi terhadap Pemanfaat Sistem Informasi dalam pengukuran Kinerja Unit, Operasionalisasi SDM dan Pemberian pelayanan publik dengan terinputnya laporan kegiatan dan kinerja pada Aplikasi SIM-M secara berkala, Update data Marves HR dan data PPID Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Program penataan sistem manajemen SDM dilakukan agar dicapai SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional dan berkinerja tinggi serta sejahtera. Keberhasilan pencapaian nilai RB pada area Penataan Sistem SDM di antaranya adalah Program ini dilakukan pengembangan pegawai yang berupa pendidikan dan pelatihan teknis, penetapan PK dan penerapan penilaian kinerja tahunan unit kerja Eselon II, Penilaian Kinerja PNS (SKP); Penggunaan Sistem absensi online dengan Marvescore; telah disusunnnya Anjab dan ABK Pegawai, sosialisasi kode etik, pemberian reward PNS teladan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada area penataan sistem SDM pada tahun 2022 adalah:

1. Tersusunya data kebutuhan jabatan PNS dan data revisi Anjab dan ABK lingkup Deputi PLK Tahun 2022 yang telah disampaikan ke Setmenko Marves sesuai nota Dinas Nomor ND.078/D4.0/MARVES/IV/2022 Tanggal 04 April 2022



2. Terlaksananya update Data PNS lingkup Deputi PLK pada Aplikasi Marves HR bulan Januari 2021 sesuai Nota Dinas Sesdep PLK No: 0016/DIV.0/Marves/I/2021 Tanggal 29 Januari 2020;
3. Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai melalui pengusulan pendaftaran beasiswa Master Degree Pemerintah Republik Korea Batch II Tahun 2021 bagi PNS lingkup Deputi PLK an. Yoce Aprianto;

4. Terlaksananya pengembangan kompetensi pejabat tinggi pratama melalui pengusulan kegiatan pelatihan program online Professional Education Program Happy Digital X yang diselenggarakan oleh Unites in Diversity Foundation a.n. Rofi Alhanif;
5. Tersusunnya Surat Edaran Deputi PLK Nomor : SE/001/DIV/Marves/II/2021 Tanggal 24 Februari tentang Tata Tertib di Lingkungan Deputi PLK dalam rangka terciptanya ketertiban dan kenyamanan kerja di kantor;
6. Terlaksananya sosialisasi Uraian Tugas dan Penyusunan Angka Kredit Jabfung Analis Kebijakan serta Finalisasi Rencana Aksi Tahun 2022 lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan serta penyampaian materi sosialisasi JFAK melalui tautan youtube LAN RI sesuai Nota Dinas Sekretariat Deputi Nomor : 041/D4.0/MARVES/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022;
7. Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai melalui keikutsertaan pegawai dalam berbagai bimtek, sosialisasi dan workshop lingkup kementerian Marves antara lain:
 - Bimtek Virtual Pemutakhiran Data Dan Informasi Publik Dan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Tanggal 8 Februari 2022;
 - Bimtek virtual Tata Cara Revisi POK Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022;
 - Workshop Virtual Preparing Preparing Government for Leading Change: Developing Strategic Thinking tanggal 16 Maret 2022.
 - *Workshop Preparing Government for Leading Change: Communication Audit for Future Planning* di lingkup Kemenko Marves tanggal 5 April 2022 secara virtual;
 - *Workshop* Fotografi dan Bimbingan Teknis Integrasi Standar Pelayanan Terpusat Kemenko Marves tanggal 11-14 April 2022 di Royal Padjajaran Bogor;
 - sosialisasi dan evaluasi fitur Marvescore lingkup Kemenko Marves pada tanggal 14 Juli 2022 di ruang rapat Lt.4 serta penyampaian usulan saran dan masukan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan

Lingkungan dan Kehutanan terkait penambahan fitur pada aplikasi Marvescore sesuai nota dinas nomor ND.151/D4/TI.01.00/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022

8. Terlaksananya Bimtek Penyusunan SKP sesuai Permenpan RB No. 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan Kinerja ASN pada tanggal 20 Oktober 2022 diruang rapat Lt.4.



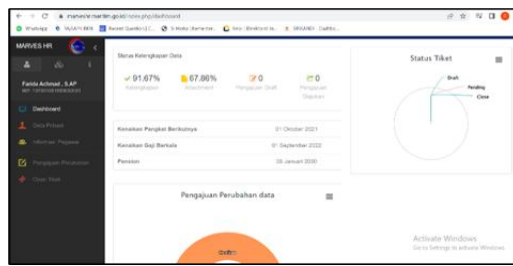
9. Tersedianya aplikasi Agenda Harian Unit Eselon II lingkup Deputy PLK dalam rangka monitoring kinerja pegawai tanggal 22 April 2022 serta telah tersedianya Link Agenda Harian Deputy PLK : <https://s.id/AgendaD4>. dan <https://s.id/FormAgendaD4>.



10. Melakukan penataan dan penyesuaian kembali penempatan PNS lingkup Deputy PLK dengan mengajukan usulan rotasi PNS ke Biro Umum sesuai nota dinas No. ND.101/DIV.0/Marves/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022



11. Telah dilaksanakan update data kepegawaian pada Aplikasi Marves HR di Deputy PLK sesuai nota dinas Sekretaris Deputy PLK kepada seluruh pejabat dan PNS Deputy PLK No. 106/DIV.0/Marves/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022.



12. Terlaksananya sosialisasi Kode Etik, Kode Perilaku dan Disiplin ASN Deputy PLK kepada PNS Tahun 2021 dan CPNS Tahun 2022 di Hotel Avenzel Bekasi Tanggal 8 Juni 2022 pada kegiatan Pembinaan CPNS.



13. Telah tersusunnya Analisis Kebutuhan Diklat Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023 kepada Biro Umum sesuai ND.135/D.IV/KP/12.02VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang usulan kebutuhan Diklat PNS.

14. Tersusunnya Juklak Penilaian Pegawai Teladan Tahun 2022, Pembentukan Tim Penilaian PNS Teladan lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sesuai Surat Tugas Nomor: ST 905/D.IV/KP.04.07/VIII/2022 serta penyampaian nota dinas Sedep PLK No. 158/D.IV/KP.04.07/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 kepada para pejabat Eselon II lingkup Deputy PLK untuk menyampaikan nama PNS yang diusulkan sebagai calon pegawai teladan tahun 2022.

15. Terlaksananya rapat tim penilai pegawai teladan dan inspratif lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tahun 2022 melalui video conference tanggal 18 Agustus 2022 serta penyampaian link survey Pemilihan Pegawai Teladan kepada seluruh pegawai 19 – 23 September 2022.

16. Terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai teladan dan terinspirasi lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022 pada tanggal 01 Oktober 2022 di Bogor.



17. Terlaksananya pengisian data TKK Administrasi lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada bulan September 2022.

18. Terlaksananya kegiatan pembinaan CPNS meliputi kegiatan pembekalan terkait tugas pokok, fungsi dan peran Deputy PLK serta kegiatan pengembangan karakter pegawai kepada PNS Tahun 2021 dan CPNS Tahun 2022 di Hotel Avenzel Bekasi Tanggal 8 Juni 2022;

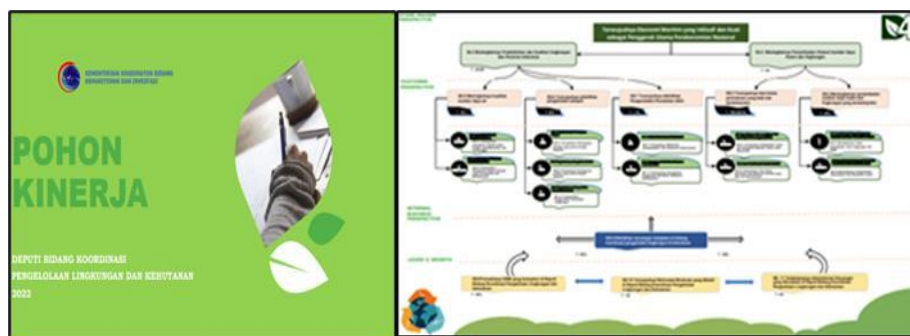


6. Penguatan Akuntabilitas

Program penguatan akuntabilitas dilakukan agar kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meningkat. Program ini dilakukan melalui Reviu atas Renstra dan IKU Deputy PLK secara berkala, Penyusunan Perjanjian Kinerja secara cascading, Monitoring dan evaluasi terhadap Renstra dan IKU secara berkala, Sistem pelaporan kinerja telah berbasis elektronik melalui SIK-M dan E-Monev.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada area Penguatan Akuntabilitas pada tahun 2022 ini adalah :

- a. Tersusunnya Manual Iku Deputi PLK Tahun 2022;
- b. Tersusunnya Rencana Aksi Pelaksanaan Program/Kegiatan Deputi PLK Tahun 2022;
- c. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Deputi dan Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Deputi PLK Tahun 2022;
- d. Tersusunnya matriks Program Prioritas dan Quick Win lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2021 sesuai Nota Dinas Sesdep PLK No: ND.0051/DIV.0/Marves/III/2021 Tanggal 23 Maret 2021;
- e. Tersusunnya Pohon Kinerja Deputi PLK tahun 2022.



- f. Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai melalui keikutsertaan pegawai dalam rangka penguatan akuntabilitas Deputi PLK melalui berbagai bimtek, sosialisasi dan workshop lingkup kementerian Marves antara lain:
 - Bimtek Penyusunan laporan lingkup Kemenko Marves pada tanggal 19 s.d. 20 Juli 2022 di ruang rapat It.4.
 - sosialisasi Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjejjangan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 26 Juli 2022 secara virtual.
- g. Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022 secara berkala (triwulan I, II, III dan IV).
- h. Terlaksananya Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022.

- i. Tersusunnya LAKIP Triwulan I, II, III dan IV lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tahun 2022 dan terlaksananya penginputan data dukung dan validasi capaian kinerja setiap pada aplikasi SIK-M Kemenko Marves.
- j. terselesaikannya pengisian LKE SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Semester I Tahun 2022.
- k. Mengikuti kegiatan sosialisasi Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjejangan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 26 Juli 2022 secara virtual.
- l. Tersusunnya Juklak Penilaian Pegawai Teladan Tahun 2022 lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan kehutanan berdasarkan capaian kinerja pegawai.

7. Penguatan Pengawasan

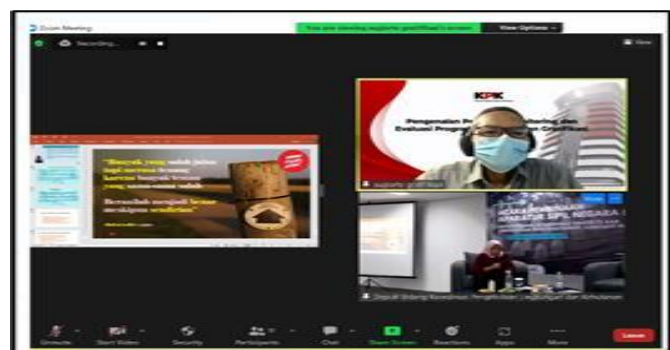
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan serta pengelolaan keuangan Deputi PLK yang andal dan terpercaya. Sasaran program penguatan pengawasan yang akan dicapai adalah:

- meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; - meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- tidak adanya tingkat penyalahgunaan wewenang.

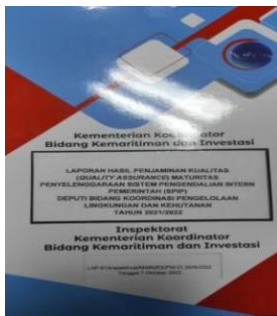
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada area penguatan pengawasan pada tahun 2022 adalah:

- a. Terlaksananya pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara lingkup Deputi PLK Tahun 2022;
- b. Tersusunnya dokumen manajemen risiko Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tahun 2022 sesuai Nota Dinas Nomor : ND. 070 /DIV.0/Marves/III/2022 Tanggal 31 Maret 2022 tentang Penyampaian Dokumen Manajemen Risiko dan Piagam Manajemen Risiko Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2021 dan Tahun 2022.

- c. Tersusunnya laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputy PLK triwulan I, II, III dan IV Tahun 2022;
- d. Tersusunnya Laporan Tahunan tahun 2021 dan Laporan bulanan Tahun 2022;
- e. Terbentuknya Tim Pengendali Gratifikasi Lingkup Deputy PLK Tahun 2022 sesuai Surat Tugas No. SP.313/D.IV.0/Marves/V/2022 Tanggal 10 Mei 2022.
- f. Terlaksananya survey eksternal persepsi korupsi di Deputy PLK Triwulan I sesuai Nota Dinas No. ND.108/D.IV.0/Marves/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022, dengan hasil survey eksternal terhadap kepuasan layanan Deputy PLK terhadap stakeholder terkait dengan nilai IPAK Unit Pelayanan 3,81 (95,29) dan Triwulan II Tahun 2022 dengan hasil survey 3,68 (Nilai IPAK Unit Pelayanan 92,06), sebagaimana Nota Dinas No. ND.187/DIV.0/OT.04.04/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.
- g. Terlaksananya public campaign terkait gratifikasi melalui pemasangan posterposter dan sosialisasi Kode Etik, Penanganan Gratifikasi, dan Wishe Blowing System Lingkup Deputy PLK kepada PNS Tahun 2021 dan CPNS Tahun 2022 di Hotel Avenzel Bekasi Tanggal 8 Juni 2022 pada kegiatan Pembinaan CPNS.



- h. Mengikuti Bimtek penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di ruang rapat It.4 pada tanggal 22-23 Agustus 2022.
- i. Terlaksananya pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP pada tanggal 25-30 Agustus 2022 serta evaluasi hasil pengisian KE SPIP internal Deputy PLK pada tanggal 2 September 2022.
- j. Terlaksananya evaluasi penilaian mandiri SPIP Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022 dengan hasil penjaminan kualitas Maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat 3,21.



No	Nama	Kategori									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2

- k. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan penilaian SPIP lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada tanggal 25 Agustus 2022 dan pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP pada tanggal 25-30 Agustus 2022 serta evaluasi hasil pengisian KE SPIP internal Deputy PLK pada tanggal 2 September 2022.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan agar dicapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan masyarakat. Program ini dilakukan melalui penyediaan database/sistem informasi dibidang lingkungan dan kehutanan guna mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pemberian layanan, kecepatan dan ketepatan dalam merespon pengaduan stakeholder terkait, pelaksanaan survei eksternal terkait pelayanan publik di lingkup Deputy PLK.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada area peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2022 adalah

- a. Terpublikasikannya pelaksanaan program/kegiatan Deputy PLK di Media Marves dan media massa lainnya selama bulan Januari s.d. Desember 2022;



- b. Terlaksananya penginputan Daftar Informasi Publik Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022 pada PPID Kemenko Marves;

No.	Mekanisme Informasi	Pejabat atau Instansi	Perangkoan	Waktu pemrosesan Informasi	Tempat permohonan Informasi	Bentuk Format Informasi	Jenis Informasi	Jangka waktu tanggapan
1	Laporan Realisasi Belanja Anggaran Desember 2022	Sekretaris Deputy	Koordinator Administrasi Umum	2022	Jakarta	Softcopy	Hardcopy	Selama masa tanggapan
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Deputy Bidang Koordinasi Pengendalian Lingkungan dan Kehutanan	Sekretaris Deputy	Koordinator Program	2022	Jakarta			Selama masa tanggapan
4	Program Peningkatan dan Kualitas Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengendalian Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2022	Sekretaris Deputy	Koordinator Program	2022	Jakarta			Selama masa tanggapan
5	Policy Brief	Achilles	Achilles	2022	Jakarta			Selama masa tanggapan

- c. Pembuatan dan pemasangan banner SOP Pelayanan Terpusat dan Non Terpusat lingkup Kemenko Marves pada Deputy Bidang Koordinasi Pengendalian Lingkungan dan Kehutanan bulan September 2022.



- d. Terlaksananya survey eksternal kepuasan layanan di Deputy PLK Triwulan I sesuai Nota Dinas No. ND.108/D.IV.0/Marves/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022, dengan hasil survey eksternal terhadap kepuasan layanan Deputy PLK terhadap stakeholder terkait dengan nilai IKM Unit Pelayanan 3,72 (93,07) dan Triwulan II Tahun 2022 dengan hasil survey 3,68 (Nilai IPAK Unit Pelayanan 91,99), sebagaimana Nota Dinas No. ND.186/DIV.0/OT.04.04/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.
- e. Terlaksananya peningkatan kapasitas pegawai pelayanan publik melalui keikutsertaan pegawai dalam berbagai bimtek, FGD, sosialisasi dan workshop lingkup kemenko Marves antara lain:
- workshop smarphome video/foto editing lingkup Kemenko Marves secara virtual tanggal 11 Agustus 2022.
 - FGD Manajemen SPBE melalui video conference dan manajemen ASET TIK lingkup Kemenko Marves tanggal 29 Juli 2022.

- Workshop Membangun Citra Pemerintah yang diselenggarakan Biro Komunikasi di lingkup Kemenko Marves pada tanggal 2 September 2022 secara virtual.
 - Workshop Manajemen Risiko SPBE dan penyusunan matrik finalisasi manajemen risiko SPBE tanggal 7 September 2022.
 - Workshop : Berpikir Kreatif yang diselenggarakan oleh Biro Humas pada tanggal 19 Juli 2022 secara virtual.
 - Sosialisasi SOP Layanan Stmenko Tanggal 31 Oktober – 3 November 2022
 - Sosialisasi PKS tentang Kerja Sama Layanan Korporasi tanggal 3 November 2022.
- f. terselesaikannya draft Manajemen Risiko SPBE Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tahun 2022 dan telah disampaikan kepada Biro Komunikasi untuk dapat ditindaklanjuti pada tanggal 19 September 2022.
- g. Mengikuti kegiatan Desk Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 (PEKPPP) Tahun 2022 Lingkup Kemenko Marves oleh Kemenpan RB pada tanggal 12 September 2022 di ruang rapat It.4. dan Evaluasi Data Dukung SPBE dan Sosialisasi Data Sektoral Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- h. Tersusunnya laporan informasi layanan publik lingkup Deputy PLK Tahun 2022.

3.1.11 Sasaran Strategis 11

Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan Keuangan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Deputy dalam rangka mewujudkan layanan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2022 ini disusun berdasarkan sumber data yang sebenarnya agar bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Dari data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data MONSAKTI pada Triwulan IV TA 2022 terdapat total Revisi POK sebanyak 48 kali dan Revisi DIPA sebanyak 15 kali yang disebabkan adanya beberapa hal antara lain :
- Penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBN 2022

- Pelaksanaan Automatic Adjustment (Pencadangan Anggaran) APBN 2022
 - Pergeseran Anggaran dengan Output KRO dan RO berbeda
 - Pergeseran Anggaran dengan Output KRO berbeda tapi RO yang sama
 - Pemanfaatan Pembukaan Blokir Pagu pada DIPA TA 2022
- b. Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2022 yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran UP/TUP dan LS berdasarkan Data di Aplikasi SAKTI adalah sebesar Rp. 14.517.585.714,- (99,60%) dari total pagu efektif sebesar Rp. 14.576.336.000,- yang merupakan pengurangan total **Pagu Anggaran** sebesar Rp.15.723.980.000,- dengan total **Blokir Anggaran** sebesar Rp. 1.147.644.000,-.
 - c. Program/kegiatan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang dilakukan dengan mekanisme LS kontraktual sampai dengan Triwulan IV sejumlah 12 kegiatan senilai Rp. 831.141.400,-.
 - d. Berdasarkan Data OMSPAN Jumlah SP2D LS dan UP/TUP pada Triwulan IV TA 2022 sebanyak 911 berkas dokumen SP2D, yang terdiri dari SP2D LS Bendahara sebanyak 766 berkas dokumen SP2D sebesar Rp. 10.666.384.132, SP2D LS Kontraktual sebanyak 12 berkas dokumen SP2D sebesar Rp. 773.042.406, UP sebanyak 1 berkas dokumen SP2D sebesar Rp. 26.989.000,-, SP2D TUP sebanyak 132 berkas dokumen SP2D sebesar Rp. 1.011.244.370,-, dan Pajak sebanyak 227 berkas dokumen SP2D sebesar Rp. 142.412.251,-.
 - e. Tidak terdapat Penolakan SPM dan telah terbit SP2Dnya.
 - f. Dari total penerimaan SP2D LS Bendahara dan Pihak Ketiga sampai dengan Triwulan IV TA. 2022 terdapat pengembalian belanja sebanyak 2 berkas dengan total nilai sebesar Rp. 12.470.128,-.
 - g. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah tidak digunakan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV TA. 2022.

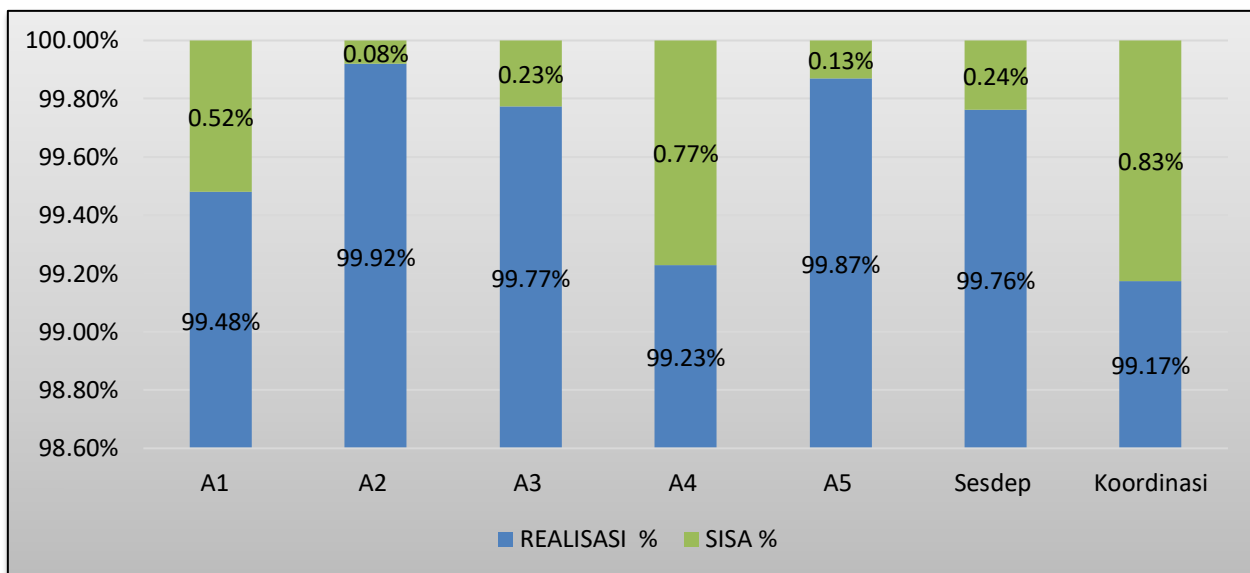
Dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, maka hal-hal yang harus dilakukan diantaranya:

- a. Harus adanya sistem monitoring dan evaluasi yang jelas agar memudahkan dalam mengontrol pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkup Deputi Bidang

Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, sehingga dapat meminimalisir masalah-masalah yang akan timbul terkait pengelolaan keuangan.

- b. Untuk membuat laporan keuangan triwulan selanjutnya sebaiknya mengacu pada laporan keuangan sebelumnya sehingga datanya akan sesuai dan relevan.
- c. Dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pada unit kerja lingkup Deputi Bidang PLK direncanakan akan dilaksanakan reward and punishment diantaranya lingkup ketaatan pengelolaan keuangan dan capaian realisasi anggaran.
- d. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan mulai dari operator, SPK hingga PPK diantaranya Bimtek aplikasi keuangan, Perpajakan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kompetensi PPK.

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2022 yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran UP/TUP dan LS berdasarkan Data di Aplikasi SAKTI adalah sebesar Rp. 14.517.585.714,- (99,60%) dari total pagu efektif sebesar Rp. 14.576.336.000,- yang merupakan pengurangan total **Pagu Anggaran** sebesar Rp.15.723.980.000,- dengan total **Blokir Anggaran** sebesar Rp. 1.147.644.000,-.



DESKRIPSI	PAGU	REALISASI	REALISASI %	SISA
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan	14.576.336.000	14.517.585.714	99,60%	58.750.286

Lingkungan dan Kehutanan				
Asdep I	1.839.717.000	1.830.155.866	99,48%	9.561.134
Asdep II	1.726.805.000	1.725.407.163	99,92%	1.397.837
Asdep III	2.286.620.000	2.281.453.300	99,77%	5.166.700
Asdep IV	2.341.420.000	2.323.365.058	99,23%	18.054.942
Asdep V	2.324.720.000	2.321.669.353	99,87%	3.050.647
Sesdep	2.040.285.000	2.035.415.701	99,76%	4.869.299
Koordinasi	2.016.769.000	2.000.119.273	99,17%	16.649.727

**Gambar. Realisasi Anggaran s.d Triwulan IV TA. 2022 per Unit Kerja Lingkup
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan**

Sedangkan berdasarkan data OMSPAN s.d per 31 Desember 2022 realisasi SP2D yang telah terbit sebesar Rp. 14.365.971.354,- yang merupakan pengajuan melalui mekanisme pembayaran LS senilai Rp 11.439.426.538,-, TUP senilai Rp. 2.757.143.565,-UP senilai Rp. 26.989.000,- dan Pajak senilai Rp. 142.412.251,-.

Data Kontrak Triwulan IV TA. 2022

Program/kegiatan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang dilakukan dengan mekanisme LS kontraktual sampai dengan Triwulan IV sejumlah 12 kegiatan senilai Rp. 831.141.400,- dengan rincian data kontrak sebagai berikut :

No	No Kontrak	Tanggal Kontrak	Uraian	Nilai Kontrak	Nama Supplier
1	SPK-1019/PPK.08/ MARVES/PL101/VII/2022	18-JUL- 2022	Sewa Perangkat Pengolah Data pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan periode 18 Juli 2022 - 17 Juli 2023	98.501.400	TRI CAKRAWALA SEMESTA
2	SPK-1021/PPK.08/ MARVES/PL101/VIII/2022	'01-AUG- 2022	Penyusunan Naskah Akademik Pembangunan Pusat Herbal-Hortikultura dan Genomik Menggali Kekayaan Alam Asli Sumatera Utara	48.000.000	DR. IR. FIRMANSYAH, M.T.
3	SPK-0995/PPK.08/ MARVES/PL101/VI/2022	23-JUN- 2022	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Teknologi Hasil Pertanian Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	54.000.000	LUSIANA MUNTHE
4	SPK-0990/PPK.08/ MARVES/PL101/VI/2022	23-JUN- 2022	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Agronomi Program Percepatan	54.000.000	FEBRINY YOHANA BANJARNHOR

			Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara		
5	SPK-0991/PPK.08/ MARVES/PL101/VI/2022	23-JUN-2022	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Agrososiologi Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	54.000.000	RIDO SUSANTRI MANIK
6	SPK-0996/PPK.08/ MARVES/PL101/VI/2022	23-JUN-2022	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Bioteknologi Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	54.000.000	SUSLIANA ESRA MODESTA SILABAN
7	SPK-0993/PPK.08/ MARVES/PL101/VI/2022	23-JUN-2022	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Sumber Daya Air Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	54.000.000	HARUN SIANTURI
8	SPK-0992/PPK.08/ MARVES/PL101/VI/2022	23-JUN-2022	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Pengelolaan Tanah Dan Hara Pertanian Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	54.000.000	DATTITA SIHITE
9	SPK-0994/PPK.08/ MARVES/PL101/VI/2022	23-JUN-2022	Jasa Konsultansi Perorangan Pendamping Bidang Teknologi Pertanian Program Percepatan Pengembangan Kawasan Food Estate Sumatera Utara	54.000.000	KRISNA MAILIN SIMANJUNTAK
10	SPK-1037/PPK.08/ MARVES/PL101/VIII/2022	'08-AUG-2022	Sewa Perangkat Pengolah Data pada Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah periode 8 Agustus 2022 - 7 Agustus 2023	59.640.000	AMIZAKIRINDO
11	SPK-1091/PPK.08/ MARVES/PL101/X/2022	25-OCT-2022	Kajian Pilot Project Kemitraan Pengusahaan Biomassa dan Batubara di Kalimantan Timur	49.000.000	PRIMAKELOLA AGRIBISNIS AGROINDUSTRI
12	SPK-0916/PPK.08/ MARVES/PL101/IV/2022	26-APR-2022	Sewa Laptop Asdep Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan dari tanggal 26 April 2022 sampai dengan 25 April 2023	198.000.000	HEBRING INTERTEK

Pengelolaan SPJ Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya dinilai dari segi kecepatan dan ketetapan didalam pengajuan SPP oleh masing-masing PPK di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ataupun kecepatan dan ketepatan dalam penerbitan PPSPM menerbitkan SPM untuk pengajuan percepatan dana di KPPN. Lebih dari itu kinerja pengelolaan keuangan juga ditentukan oleh ketepatan dan kecepatan di Lingkup PPK dalam membuat dan menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan terhadap penggunaan uang Negara sebagai bentuk akuntabilitas keuangan.

Pengelolaan SPJ keuangan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang dilakukan melalui mekanisme pengelolaan UP/GUP selama ini tidak mengalami kendala sama sekali, karena rata-rata dokumen pengajuan UP/TUP dapat diselesaikan paling lama 1 (satu) minggu dan seluruh dokumen sudah diselesaikan dalam bentuk dokumen rampung.

Pengelolaan SPJ Keuangan yang sedikit agak mengalami kendala adalah SPJ Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengelolaan LS, karena sebagian besar kegiatan dilakukan dengan LS. Jumlah SP2D LS dan UP/TUP pada Triwulan IV TA 2022 sebanyak 47 dokumen, yang terdiri dari SP2D LS Bendahara sebanyak 766 berkas dokumen SP2D sebesar Rp. 10.666.384.132, SP2D LS Kontraktual sebanyak 12 berkas dokumen SP2D sebesar Rp. 773.042.406, UP sebanyak 1 berkas dokumen SP2D sebesar Rp. 26.989.000,-, SP2D TUP sebanyak 132 berkas dokumen SP2D sebesar Rp. 1.011.244.370,-, dan Pajak sebanyak 227 berkas dokumen SP2D sebesar Rp. 142.412.251,-.

Penolakan SPM

Salah satu indikator yang berdampak terhadap penilaian kinerja pengelolaan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada TA. 2022 adalah seberapa banyak SPM yang ditolak di KPPN. Semakin banyak SPM yang ditolak maka dapat menyebabkan menurun Nilai Pengelolaan Keuangan. Sampai dengan Triwulan IV TA 2022, terdapat tidak ada penolakan SPM yang diajukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Pengembalian Sisa Belanja

Dari total penerimaan SP2D LS Bendahara dan Pihak Ketiga sampai dengan Triwulan IV TA. 2022 terdapat pengembalian belanja sebanyak 2 berkas dengan total nilai sebesar Rp. 12.470.128,-

NO	NTPN	KETERANGAN	SETORAN PER AKUN	URAIAN	TANGGAL BAYAR
1	F4B922CNQ78K7K20	SPM 02141 MAK 5601 EBD 952 057 A 524119 TA 2022 Deputi 4	3.420.000	Pengembalian LS Pembayaran Perdin ke Bandung-Jawa Barat	23-Mei-22
2	D619F6QR9C4J9539	SPM 02882 MAK 5996 ABV 002 052 A 524111 TA 2022 Deputi 4	620.640	Pengembalian Refund Tiket atas nama Dimas Yunus Tirtana	30-Jun-22

3	9FC845209MVTA6R7	SPM 00591 MAK 5601 EBA 960 056 A 524119 TA 2022 Deputi 4	450.000	UH an Badhawi kegiatan Finalisasi SKP	28-Sep-22
4	C488B8JM919GIQQR	SPM 02075 MAK 5601 EBA 962 065 A 524119 TA 2022 Deputi 4	150.000	Representatif Yogyakarta an Dirhansyah	01-Nov-22
5	EF3CB0JSQI40UC2O	SPM 02474 MAK 5601 EBD 952 057 A 524114 TA 2022 Deputi 4	75.000	Representatif dalam kota an Dirhansyah	02-Nov-22
6	65D016QR9C4NPFRJ	SPM 02264 MAK 5996 ABJ 008 052 A 524119 TA 2022 Deputi 4	1.057.000	UH 2nd Working Level Meeting	09-NOV- 22
7	BE9A02CNQ78QUOQ6	SPM 09485 MAK 5996 ABJ 012 052 A 524219 Item 003929 Asuransi Rp32000 018163 Visa Rp507500 TA 2022 DEPUTI IV	539.500	Asuransi dan Visa Kanada	28-Des-22
8	498065UDPHICIPIC	SPM 08878 MAK 5996 ABJ 007 052 A 524119 Item 013205 Tiket Pesawat TA 2022 DEPUTI IV	412.033	Tiket perdin Belitung monev pelaksanaan Kepmenko 88 tahun 2021	28-Des-22
9	3DAA32CNQ78QUHUG	SPM 06981 MAK 5996 ABV 006 052 A 524119 Item 015925 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perdin DN TA 2022 DEPUTI IV	1.206.688	Tiket pesawat perdin isu lingkungan di Babel	28-Des-22
10	2A0CC6QR9C4OVBE7	SPM 06965 MAK 5996 ABJ 006 052 A 524119 TA 2022 Deputi 4	2.774.520	UH dan tiket Belitung	27-Des-22
11	DFE757N8P6N5CEQC	SPM 09067 MAK 5996 ABJ 005 052 A 524219 TA 2022 Deputi 4	1.764.747	Uh dan taksi kegiatan Jerman	27-Des-22

MASALAH DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran kegiatan di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang terjadi selama ini.

- a) Pergantian PPK Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada TA 2022 yang menyebabkan keterlambatan pendaftaran ulang user pada aplikasi SAKTI di awal tahun 2022;

- b) Aplikasi SAKTI yang baru diterapkan di TA 2022 masih belum familiar dipergunakan oleh masing-masing operator banyak hambatan khususnya dalam aturan baru yang ada di aplikasi tersebut;
- c) Pelaksanaan aturan PPKM Nasional akibat meningkatnya kasus Covid 19 varian Omicron berdampak terhadap pembatasan aktivitas pada Triwulan I TA 2022;
- d) Pelaksanaan pengajuan keuangan di Triwulan IV melalui mekanisme dokumen elektronik pada satu sisi memperlancar pengajuan keuangan tetap berjalan, tetapi di lain sisi menyisakan pekerjaan tindaklanjutnya menjadi dokumen fisik;
- e) Pelaksanaan Automatic Adjustment (Pencadangan Anggaran) APBN 2022 dan Blokir pada awal tahun menyebabkan Pengurangan terhadap Pagu Efektif;
- f) Perencanaan anggaran kurang optimal sehingga masih sering dilakukan revisi anggaran;
- g) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum efektif;
- h) Pelaksanaan kontrak belum tepat waktu;
- i) Keterbatasan pengajuan melalui mekanisme UP/TUP;
- j) Kebijakan Sewa Kendaraan pada Surat Edaran Sesmenko No.633/Marves/Sememko/ND/2021 tentang Penegasan terkait Aturan Sewa Kendaraan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, menyebabkan potensi terlambat terserapnya MAK Kegiatan Perjalanan Dinas dan Belanja Sewa;
- k) Pada TA 2022 pelaksanaan realisasi anggaran untuk Deputi Bidang PLK baru dilaksanakan pada awal bulan Maret 2022;
- l) Permintaan data scan berkas keuangan lingkup Deputi Bidang PLK kurang didukung sarana alat scanner yang tersedia di unit kerja, perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Biro Umum.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mendukung peningkatan kinerja serta tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan setiap bulan sekali. Tujuan utama dilakukan monitoring dan evaluasi adalah untuk :

1. Menilai pelaksanaan anggaran kegiatan, sehingga dapat teridentifikasi apakah

pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, telah mencapai target keluarannya, telah memenuhi tujuannya, telah memberikan dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal lainnya.

2. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif;
3. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran kegiatan untuk periode berikutnya;
4. Melaksanakan akselerasi percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan IV TA 2022;

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Triwulan IV Tahun 2022 ini disusun berdasarkan realisasi dari rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022. Laporan yang berisikan informasi kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selama bulan Januari - Desember 2022 sebagai media informasi dan komunikasi untuk lebih mengenalkan segala bentuk aktifitas di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh komunikasi yang baik dan kerja sama terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak-pihak yang berkepentingan. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat beberapa kendala, baik internal maupun eksternal, yaitu:

4.1. Internal

- a. Kekurangan jumlah tenaga (pejabat dan pegawai pelaksana) Deputy Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan masih belum teratasi/terpenuhi.
- b. Masih terdapat pelaksana kegiatan yang belum dapat memfokuskan dan menjabarkan target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi utama bagian/unitnya.

4.2. Eksternal

- a. Masih banyak regulasi dan atau kewenangan yang tumpang tindih serta adanya ego sektoral Kementerian/Lembaga, pemda yang dapat menghambat lajunya pembangunan di bidang kemaritiman.
- b. Fluktuasi kondisi ekonomi regional dan global.

Laporan ini diharapkan mampu memenuhi akuntabilitas kinerja lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dan menjadi bahan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya.

Jakarta, Januari 2023

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan



Nani Hendiarti